

Buletin

MIMBAR

PARIPURNA

● Edisi Januari 2023

Perjuangkan Aspirasi Rakyat



KEBUT INFRASTRUKTUR KOTA



Buletin

MIMBAR

PARIPURNA

Perjuangan Aspirasi Rakyat

SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR

PEMBINA/PENASEHAT:

Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo, SH

Wakil Ketua I Adi Rasyid Ali, SE

Wakil Ketua II Ir. Andi Suhada Sappaile

Wakil Ketua III H. Andi Nurhaldin NH, SE

Ketua Komisi A Rahmat Tagwa Qurais

Ketua Komisi B Erick Horas

Ketua Komisi C Sangkala Saddiko

Ketua Komisi D Andi Hadi Ibrahim Baso

PENGARAH:

Sekretaris DPRD Kota Makassar

H. Dahyal, S.Sos.,M.Si.

PENANGGUNG JAWAB:

PPID Pembantu Sekretariat

DPRD Kota Makassar

Kabag Umum Dr. Muhajir, SKM., M.Kes

Kabag Keuangan Abd. Kadir, SE., MM

Plt Kabag Persidangan Hj. Rafiqah Luthfi, SE.,MM

Kabag Perlengkapan Daniel Katto, SE.,MM

ALAMAT KANTOR DPRD KOTA MAKASSAR:

Jl. Andi Pangerang Pettarani, Blok E No. 1-2

Tidung, Kec. Rappocini, Kota Makassar,

Sulawesi Selatan 90222



0811 411 0309



ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR
TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

2

BULETIN MIMBAR PARIPURNA

Indeks Parlemen

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan Buletin Paripurna bulan ini.

Adapun beberapa news trending dirangkum oleh Tim Redaksi Buletin Mimbar Paripurna kali ini. Diantaranya: di Awal Tahun 2023 tepatnya di Bulan Januari, Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo langsung melakukan kunjungan ke masyarakat Kecamatan Mariso dan Mamajang. Hal ini dalam rangka mempererat tali silaturahmi dengan warga sekaligus ingin betul-betul menyentuh masyarakat.

Kunjungan Politisi Partai NasDem itu mendapat apresiasi dari masyarakat. Banyak warga mendoakannya melanjutkan pemerintahan Danny Pomanto pada 2024 mendatang. "Pak Ketua Anak Rakyat, Majuki di 2024, rakyat bersama bapak," itulah suara yang diucapkan salah satu masyarakat Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso.

Wakil Ketua DPRD Makassar Adi Rasyid Ali menuturkan melihat isu yang berkembang tersebut tentunya pihak KPU sebelum memutuskan agar sekiranya untuk menghadirkan tokoh tokoh organisasi masyarakat agar tidak terjadi kegaduhan nantinya.

Bersama dengan anggota Komisi A DPRD Makassar bidang pemerintahan gelar rapat terkait penataan dapil pada pemilihan umum pemilu 2024 mendatang. Rapat itu digelar di ruang BANGGAR DPRD Makassar Jalan AP Pettarani Makassar Jumat 06/01/2023.

Pada kesempatan itu Ketua KPU Kota Makassar Farid Wajdi dihadapan legislator DPRD Makassar mengatakan bahwa melakukan usulan dengan 3 opsi salah satunya ialah penataan dapil dari lima menjadi 7 dapil dipemilu 2024, alasannya ada beberapa dapil jumlah pemilihnya gemuk sehingga diperlukannya pemisahan seperti biringkanaya dan Tamalanrea terbagi dua dapil.

DPRD Kota Makassar juga sedang menggodok Ranperda terhadap kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) tahun 2023. Wacana tersebut dibenarkan oleh salah satu Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Andi Suhada Sappaile saat dikonfirmasi via WhatsApp. Bukan tanpa dasar dan data, ia mengungkapkan penggodokan peraturan tersebut berdasarkan pengamatan dan survei yang dilakukan anggota DPRD Makassar terhadap pergaulan remaja yang sudah memprihatinkan.

Akhir kata kami berharap semoga buletin Mimbar Paripurna DPRD Kota Makassar dapat memberikan manfaat termasuk informasi publik yang edukatif kepada masyarakat, Amin.

Makassar, 31 Januari 2023

Daftar Isi

Hal. 4
**Rudianto Lallo Sapa Warga Mariso dan Mamajang,
Didoakan Jadi Walikota Makassar**



Hal. 5
**ARA Ogah Setujui Usulan KPU Makassar
Soal Penataan Dapil**



Hal. 6
**Dewan Prihatin Fenomena LGBT,
Andi Suhada: Selamatkan Generasi Muda!**



Hal. 7
**Gagalkan Peredaran 43 Kg Sabu,
Andi Nurhaldin Puji Kinerja Polisi**



- 8 Berita Komisi A
- 9 Berita Komisi B
- 10 Berita Komisi C
- 11 Berita Komisi D
- 12 Ketua DPRD Makassar Beri Bantuan ke Korban Angin Puting Beliung di Cambaya DAN Andi Suhada Sappaile:Hadiri Rapat Konsultasi Tatib DPRD Makassar
- 13 Adi Rasyid Ali Masuk Radar Nitizen Balon Walikota Makassar 2024
- 14 Berita Reses dan Sosialisasi Perda Anggota DPRD Kota Makassar
- 37 Walikota Dukung Ranperda Larangan LGBT yang Diinisiasi DPRD Makassar
- 38 Ini 18 Partai Politik yang Lolos Peserta Pemilu 2024
- 39 DPRD Makassar Bentuk Ranperda Bangunan Gedung

- 40 Pimpinan Daerah IPIM Makassar Silaturahmi Dengan Ketua DPRD Rudianto Lallo
- 41 Sekwan DPRD Makassar Beri Bantuan Korban Banjir di Kecamatan Biringkanaya
- 42 DPRD Makassar Setujui Nama Jalan Cenderawasih Diganti Jadi Opu Daeng Risadju
- 43 Dinilai Sistem Kehumasan Baik, Makassar Ditunjuk Jadi Tuan Rumah IGA 2023
- 44 Dewan Ingatkan Agar Bangunan RSUD Daya Makassar Berbanding Lurus Kesejahteraan Nakes
- 45 Soal PSEL, DPRD Ingatkan Pemkot Hati-hati Kerja Sama dengan Investor
- 46 Tahun Baru 2023 Eratkan Rasa Kekeluargaan, Wali Kota Rangkul OPD Lewat Family Gathering di Tokka
- 47 Struktur Organisasi Komisi A dan B
- 48 Struktur Organisasi Komisi C dan D

Rudianto Lallo Sapa Warga Mariso dan Mamajang, Didoakan Jadi Walikota Makassar



DPRD MAKASSAR - Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo melakukan kunjungan ke masyarakat Kecamatan Mariso dan Mamajang. Hal ini dalam rangka mempererat tali silaturahmi dengan warga sekaligus ingin betul-betul menyentuh masyarakat.

Kunjungan yang dilakukan oleh Politisi Partai NasDem itu mendapat apresiasi dari masyarakat. Banyak warga mendoakannya melanjutkan pemerintahan Danny Pomanto pada 2024 mendatang.

"Pak Ketua Anak Rakyat, Majuki di 2024, rakyat bersama bapak," kata Subaedah salah satu masyarakat Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Sabtu, (7/1/2023).

Hal yang hampir sama disuarakan masyarakat pada 9 titik lainnya. Mereka ingin Legislator dua periode Makassar itu agar naik tingkat. Dia menginginkan pemimpin dari bawah. Pemimpin yang dapat mengetahui apa yang dibutuhkan

rakyat, bukan datang ke rakyat disaat masa-masa suara rakyat dibutuhkan.

"Kami ingin anak rakyat memimpin Makassar. Kami ingin berjuang bersama anak rakyat di 2024 mendatang," tegas Arif, tokoh masyarakat Kelurahan Lette.

Kendati diinginkan oleh kalangan bawah menjadi nahkoda Kota Makassar, penerus Danny Pomanto, Rudianto Lallo hanya ingin didoakan. Dia menyampaikan jika kehadirannya dapat berguna untuk masyarakat, untuk semua kalangan.

"Tujuan kami hadir ini untuk bersilaturahmi dengan masyarakat. Selain itu, saya masih ada masa jabatan kurang lebih dua tahun selaku Ketua DPRD Makassar, semoga disisa masa jabatan saya ini dapat berguna untuk masyarakat Kecamatan Mariso dan Mamajang," kata Rudianto Lallo.

Ketua Dewan Pendidikan Makassar

itu juga menyampaikan kepada masyarakat yang ditemuinya agar tidak merendahkan atau memandang rendah pendidikan. Dia berharap agar anak-anak disekolahkan setinggi-tingginya.

"Janganki putus semangat, sekolahkan anakta. Saya ini masih duduk di bangku kelas 2 SMA orang tua saya, bapak saya sudah meninggal, ibu saya seorang guru mengaji, tapi karena cita-cita dan niat yang tulus, siapa sangka saya bisa menjadi anggota DPRD usia 33 tahun, hingga menjadi Ketua DPRD usia 36 tahun. Semua ini karena saya mengejar pendidikan," kata Rudianto Lallo menyemangati warga.

Olehnya itu, politisi yang belatar belakang pengacara ini ingin orang tua tergerak hatinya, merelakan seluruh perhiasan dan emasnya demi pendidikan anak. Menurut dia, dengan pendidikan yang tinggi, anak dapat mengubah masa depan keluarga bahkan dunia. (*)



ARA Ogah Setujui Usulan KPU Makassar Soal Penataan Dapil

DPRD MAKASSAR - Anggota Komisi A DPRD Makassar bidang pemerintahan gelar rapat terkait penataan dapil pada pemilihan umum pemilu 2024 mendatang.

Rapat itu digelar di ruang BANGGAR DPRD Makassar Jalan AP Pettarani Makassar Jumat 06/01/2023.

Pada rapat itu dihadiri Wakil Ketua DPRD Makassar Adi Rasyid Ali dan Andi Suhada Sappaile, Ketua KPU Makassar Farid Wajdi, Ketua Komisi A DPRD Makassar RahmatbTaqwa Quraisy, Anggota Komisioner KPU Gunawan Mashar, Endang Sari, serta Legislator DPRD Makassar diantaranya William Louren, Wahab Tahir, Fasruddin Rusli, Andi Fahlevi, Muhlis Misbah, Azwar ST, M Yunus serta Al Hidayat Syamsu.

Pada kesempatan itu Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Farid Wajdi dihadapan legislator DPRD Makassar mengatakan bahwa melakukan usulan dengan 3 opsi salah satunya ialah penataan dapil dari lima menjadi 7 dapil dipemilu 2024, alasannya ada beberapa dapil jumlah pemilihnya gemuk sehingga diperlukannya pemisahan seperti biringkanaya dan Tamalanrea terbagi dua dapil.

Dia mengatakan bahwa penataan dapil dan rancangan merujuk pada naskah akademik tahun 2017. Selain itu, ada juknis PKPU menjadi rujukan.

Ini sebatas rancangan berdasarkan naskah akademik 2017. Tentu ini masih pencermatan belum final dan masih panjang tahapannya. Kita

masih akan uji publik dengan FGD berkali-kali. Masih butuh tanggapan masyarakat. "tuturnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Makassar Adi Rasyid Ali menuturkan melihat isu yang berkembang tersebut tentunya pihak KPU sebelum memutuskan agar sekiranya untuk menghadirkan tokoh tokoh organisasi masyarakat agar tidak terjadi kegaduhan nantinya.

Beda dengan Legislator Komisi A Irwan Jafar sangat menolak penataan dapil, olehnya itu ia berharap agar pihak KPU untuk mengkaji ulang opsi tersebut ke KPU RI.



Dewan Prihatin Fenomena LGBT, Andi Suhada: Selamatkan Generasi Muda!



DPRD MAKASSAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar dikabarkan sedang menggodok rancangan peraturan daerah (Ranperda) terhadap kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) tahun 2023.

Wacana tersebut dibenarkan oleh salah satu Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Andi Suhada Sappaile saat dikonfirmasi via WhatsApp pada Jumat (6/1/2023) malam.

"Ini inisiasi komisi D yg membidangi kesejahteraan sosial," ungkap Suhada kepada Pijarnews.com.

Bukan tanpa dasar dan data, ia mengungkapkan penggodokan

peraturan tersebut berdasarkan pengamatan dan survei yang dilakukan anggota DPRD Makassar terhadap pergaulan remaja yang memprihatinkan.

Berdasarkan survei yang dilakukan, ia membeberkan pertumbuhan perilaku seksual remaja di Kota Makassar mulai meningkat.

"Teman-teman di DPRD melihat kondisi pergaulan terutama remaja di Makassar sekarang sangat memprihatinkan, dari bener survei yang diliris ternyata pertumbuhan penyimpangan seksual ini sudah mulai merangkak naik selain narkoba," terang politisi partai PDIP itu.

Atas fenomena itu lanjutnya, maka diperlukan Perda yang mengatur tentang LGBT di Kota Makassar. "Itu untuk menyelamatkan kehidupan masyarakat Makassar khususnya generasi muda kedepannya," imbuhnya.

Terkait gambaran umum aturan yang akan dicantumkan pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Namun pihaknya telah memasukkan dalam daftar Prolegda.

"Nanti lah dek belum kami bahas tapi kami sudah masukkan dalam daftar prolegda," tutupnya.

Gagalkan Peredaran 43 Kg Sabu, Andi Nurhaldin Puji Kinerja Polisi



DPRD MAKASSAR - Politisi Partai Golkar yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Andi Nurhaldin Nurdin Halid mengapresiasi langkah sigap Polrestabes Makassar menggagalkan peredaran 43 kg sabu di Makassar.

Nurhaldin menilai, 43 kg sabu tersebut mengancam dan merusak generasi muda di Kota Daeng.

"Atas nama pribadi sebagai orang tua dan pimpinan DPRD kota Makassar, kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Polda Sulsel, Kapolrestabes Makassar dan BNN yang telah berhasil menggagalkan satu lagi jaringan narkoba yang bisa merusak generasi kita," kata Andi Nurhaldin kepada wartawan Kamis (12/1/2023).

Nurhaldin mengatakan, tidak bisa membayangkan bagaimana jika barang haram itu berhasil diedarkan oleh jaringan ini.

"Saya serasa sedih bagaimana melihat barang-barang haram ini yang bisa merusak generasi kita ke depannya," ujar Nurhaldin.

Nurhaldin berharap setelah penangkapan jaringan itu, tidak ada lagi jaringan-jaringan baru yang mencoba coba masuk di Sulsel dan Kota Makassar pada khususnya.

Baginya, penangkapan 43 kg sabu itu menjadi bukti Sulawesi Selatan bersama Polda Sulsel dan Kota Makassar bersama Polrestabes Makassar disertai BNN akan berperang melawan penyebaran narkoba.

"Kita nyatakan perang kepada penyebaran narkoba dengan segala

jenisnya dan membersihkan seluruh jaringan-jaringan ini sampai akarnya untuk menyelamatkan generasi kita dari penyalahgunaan narkoba," ujar Nurhaldin.

"Kami di DPRD Makassar akan ikut serta menjadi garda terdepan mengawal serta agar terciptanya Sulsel dan kota Makassar insya Allah kelak akan menjadi percontohan daerah yang bebas dari barang-barang haram ini. Sulsel dan Kota Makassar akan lantang berteriak katakan tidak pada narkoba," tegas Nurhaldin.





Rachmat Taqwa Quraisy Soroti Perda KTR Belum Maksimal

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar Rachmat Taqwa Quraisy (RTQ) memulai kegiatan sosialisasi penyebaran produk hukum daerah (Sosper) tahun anggaran 2023, di Hotel Travellers, Jl. Lamaddukelleng Buntu, Rabu (26/01/2023).

Sosper kali ini mengangkat tema "Perda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok" menghadirkan narasumber, Andi Muhammad Imam Ilyas (Lurah Gusung), serta Al Hidayat Samsu (tpkoh pemuda).

Dalam sambutannya, RTQ mengemukakan, Perda KTR ini hadir untuk memberikan lingkungan sehat dan udara yang bersih bagi

setiap orang. Juga untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat, bukan hanya pembatasan penggunaannya tetapi juga peredarannya.

Utamanya di tempat keramaian dan di tempat pelayanan publik, seperti fasilitas pelayanan masyarakat, sekolah, tempat anak bermain, rumah ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum.

"Tujuannya untuk melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan. Juga melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari asap rokok," kata RTQ.

Namun demikian, RTQ menilai, jika

dilihat dari regulasinya, Perda Kawasan Tanpa Rokok ini telah disahkan sejak 2013 lalu, namun hingga kini penegakannya belum maksimal dilaksanakannya. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi ketengah masyarakat.

Untuk itu RTQ berharap, melalui sosialisasi ini semakin meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak merokok pada area publik yang dilarang.

"Perda KTR dapat terlaksana lebih optimal bila semua pihak berperan aktif mematuhi larangan merokok utamanya di area publik," tandas RTQ. (**/RIs)



Gerindra Makassar Siap Berjuang untuk Prabowo Subianto Capres 2024



DPRD MAKASSAR – Partai Gerindra Kota Makassar menyatakan kesiapannya memenangkan Prabowo Subianto calon presiden 2024 dan memenangi pemilu legislatif 2024.

Ketua DPC Gerindra Makassar Eric Horas mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan infrastruktur partai hingga tingkat kelurahan.

Hal itu disampaikan saat menyambut kunjungan Ketua DPD Gerindra Sulsel Andi Darmawan Aras dan Sekretaris Darmawangsyah Muin di Kantor DPC Gerindra Makassar Senin (9/1/2023).

"Alhamdulillah struktur dan infrastruktur DPC Gerindra Makassar sudah rampung sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. Kita siap memenangkan Pak Prabowo dan menang Pileg di Makassar," kata Eric Horas. Eric meyakini Prabowo Subianto masih memiliki elektabilitas yang kuat di Kota Makassar.

Seperti Pilpres 2019 lalu ketika pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno tampil sebagai pemenang di Sulsel mengalahkan pasangan Jokowi-Maruf Amin.

"Kader Gerindra Makassar siap bekerja keras meyakinkan masyarakat Kota Makassar, Gerindra akan bekerja

mendapatkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi," kata Eric Horas.

Kedua, Eric Horas menyatakan struktur dan infrastruktur yang telah dibangun diharapkan mampu mewujudkan harapan Gerindra untuk tampil sebagai pemenang pemilu di Kota Daeng.

Pada Pilpres 2019 lalu, Gerindra mempertahankan capaian 5 kursi DPRD Makassar. Namun Gerindra kehilangan kursi pimpinan DPRD Makassar.

Saat itu Gerindra kalah bersaing dengan Nasdem, PDIP, dan Demokrat yang meraih 6 kursi, dan kalah suara dari Golkar yang juga meraih 5 kursi.

"Sebagai partai politik, tentu harapan kita jadi pemenang pemilu legislatif, cita-cita itu tidak mudah, harus disertai dengan kerja keras di semua tingkatan," kata anggota DPRD Makassar itu.

Dalam kesempatan itu Ketua DPD Gerindra Sulsel Andi Darmawan Aras turun mengecek kesiapan struktur dan infrastruktur partai di DPC Gerindra Makassar .

Andi Iwan Aras bersama kader Gerindra Makassar membahas kesiapan Pilpres dan pileg 2024. "Memenangkan Pak Prabowo jadi prioritas, kedua kami diskusi

masalah pencalegan dan pilkada, baik itu pilwali dan pilgub. Ya kami konsolidasi dan pak ketua memastikan semua struktur sudah terisis penuh," kata Eric Horas.

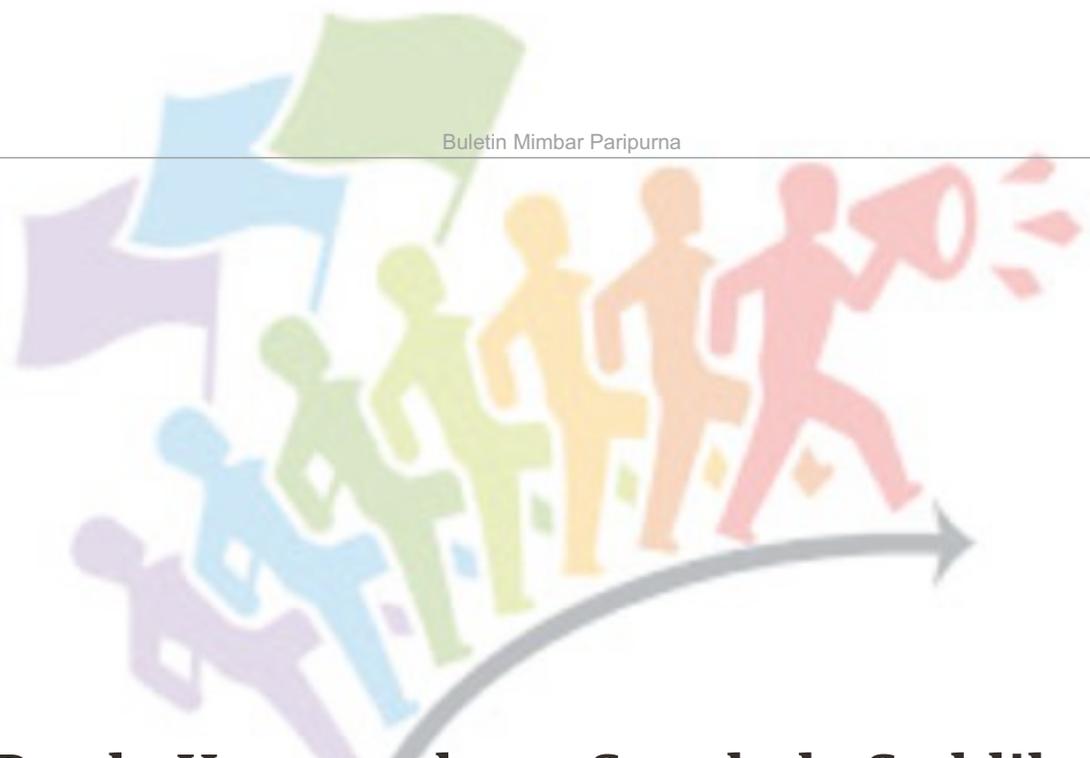
Eric Horas menyampaikan tingginya animo masyarakat Makassar ingin mencalonkan diri jadi calon anggota legislatif di Partai Gerindra.

"Banyak yang mendaftar ke Gerindra, otomatis tidak bisa semua diakomodir. kita tentu melakukan penyaringan dan seleksi, kita lihat kapasitas dan kompetensi para pendaftar," kata Erick.

Sementara itu Ketua DPD Gerindra Sulsel Andi Iwan Darmawan Aras mengingatkan pembentukan infrastruktur partai hingga tingkat TPS.

Infrastruktur itu diharapkan jadi mesin tempur pemenangan Prabowo Subianto maju calon presiden 2024 dan pemenangan Gerindra pemilu legislatif 2024.

"Poin sangat penting untuk menjadi perhatian bagi pengurus Gerindra yaitu pembentukan infrastruktur partai sampai ketinggian TPS dan bagaimana perekrutan caleg potensial dilakukan mapping area yang dipandu oleh Bappilu," kata Andi Iwan Aras di hadapan pengurus.



Perda Kepemudaan, Sangkala Saddiko Dorong Pemuda Makassar Produktif

DPRD MAKASSAR - Membahas tentang pemuda, memiliki kondisi berbeda dari zaman dulu. Anak muda zaman sekarang tentu menyiapkan harapan yang begitu besar untuk tetap produktif dan jauh dari kriminalitas.

“Kehadiran pemuda itu berdiri pada jajaran yang sebenarnya. Karena yang diharapkan tentu pemuda yang memiliki kemampuan intelektual dalam hal kreatifitas dan produktifitas,” pungkasnya.

Demikian disampaikan anggota DPRD Kota Makassar H. Sangkala

Saddiko saat membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan 2, dengan menjabarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kepemudaan di Hotel Sarison, Makassar, Sabtu (28/01/2023).

Mendampingi legislator PAN DPRD Makassar itu, kegiatan ini menghadirkan narasumber, Tenaga Pengajar SMA 15 Makassar, Besse Sukmawati Makkarakka, dan Akademisi/Tokoh Pemuda, Drs. Bunamin.

Melalui perda tersebut, Akademisi/Tokoh Pemuda, Drs.

Bunamin mendorong agar peserta kegiatan bisa lebih pro aktif dalam mensosialisasikan aturan ini ke masyarakat terkhusus pemuda. Dengan itu, pemuda lebih berkontribusi ke daerah.

“Perda ini sudah mengatur terkait bagaimana para pemuda bisa lebih berkontribusi lagi ke daerah dan mencegah hal yang tidak-tidak. Saya berharap pemuda pemudi ketika kita sampai di lingkungan ta, kita lagi sebagai corong pemerintah,” jelasnya. (ILH)





Ketua DPRD Makassar Beri Bantuan ke Korban Angin Puting Beliung di Cambaya

DPRD MAKASSAR - Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo memberi perhatian terhadap korban angin puting beliung di Kelurahan Cambaya, Kecamatan Ujung Tanah, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Rudianto menyalurkan sejumlah bantuan kepada para penyintas angin puting beliung.

"Kita memberikan santunan saja ke beberapa korban yang kita kunjungi. Ada sekitar 78 rumah yang kena dampak rusak dan ringan karena puting beliung Rabu (4/1) kemarin," kata Rudianto Lallo kepada detikSulsel, Kamis (5/1/2023).

Selain mengunjungi rumah yang terdampak, Rudianto juga memberikan semangat kepada penyintas bencana tersebut. Selain itu, dirinya juga sekaligus memantau pergerakan pemerintah dalam menyikapi bencana yang menimpa masyarakat di Makassar.

"Tadi kami mengunjungi untuk memberi semangat, melihat korban-korban yang punya rumah. Sekaligus memastikan bahwa pemerintah bergerak cepat dalam memberi solusi terbaik dampak angin puting beliung tersebut," sambungnya.

"Tadi kami bergerak untuk memastikan apakah bantuan-bantuan pemerintah kota sudah sampai. Kami ditemani oleh badan bencana daerah, bahwa pemerintah hadir untuk korban-korban angin puting beliung," imbuhnya.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah IV Makassar mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Sulsel. Hujan lebat yang disertai angin kencang diprediksi terjadi di sejumlah wilayah Sulsel pada tanggal 3 hingga 9 Januari 2023.

"Prakiraan tanggal 03-09 Januari 2023, hujan dengan intensitas lebat yang cenderung pada dini hari sampai pagi hari berpotensi terjadi di wilayah Sulawesi Selatan," tulis BMKG dalam keterangannya, Selasa (3/1).

Andi Suhada Sappaile: Hadiri Rapat Konsultasi Tatib DPRD Makassar



DPRD MAKASSAR - Ketua PDIP Kota Makassar Andi Suhada Sappaile hadir rapat konsultasi pimpinan di Ruang Badan Anggaran (Banggar), Kamis (02/02/2023).

Pertemuan ini menindaklanjuti hasil konsultasi dan Rapat Pimpinan terkait Revisi Peraturan Dewan tentang Tata tertib (Tatib) DPRD Kota Makassar.

Selain itu, pada kesempatan itu pula membahas tentang Pelaksanaan Reses, Pelaksanaan Sosperda, Pelaksanaan Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) dan mekanisme Pembahasan Anggaran.

Rapat konsultasi ini dihadiri langsung Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo bersama Wakil Ketua, Ady Rasyid Ali, Andi Suhada Sappaile dan Andi Nurhaldin NH.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Para Pimpinan Fraksi, Pimpinan Komisi, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Makassar.

Kemudian, Ketua Badan Kehormatan, Sekretaris DPRD beserta jajarannya serta Staf Ahli DPRD Kota Makassar.



Adi Rasyid Ali Masuk Radar Nitizen Balon Walikota Makassar 2024



DPRD MAKASSAR –Ketua DPC Partai Demokrat Kota Makassar Adi Rasyid Ali kembali masuk dalam radar nitizen sebagai bakal calon (balon) walikota Makassar. Poling tersebut dilakukan oleh Jaringan Suara Masyarakat (JSM) 2022.

Pilwali Makassar 2024 bakal berjalan dinamis. Sebab tak ada petahana. Ruang bagi balon walikota terbuka lebar bagi siapa saja. Figur lama dan figur baru punya kesempatan yang sama. ARA, sapaan Adi Rasyid Ali mengakui hal itu. Ia menegaskan kader partai berlambang segi tiga mercy bakal ikut meremajakan bursa Pilwalkot Makassar 2024 mendatang.

“Di Pilwali Makassar 2024 nanti akan dinamis. Karena itu Partai Demokrat akan menyiapkan kader terbaik. Kita tidak mau jadi penonton,” katanya, Kamis (4/1/2023).

Legislator tiga periode ini bahkan menegaskan siap jika diamanahkan oleh partainya. Menurut dia, momentum Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 wajib dimaksimalkan.

“Seluruh kader harus bekerja maksimal. Ini kesempatan terbaik untuk menunjukkan militansi para

kader. Oleh karena itu, kader Demokrat akan selalu siap untuk Pileg dan Pilkada,” katanya.

Namun ARA mengaku belum terlalu memikirkan ke arah sana. Di parlemen ia selalu fokus bekerja untuk kepentingan rakyat di sisa waktu hingga berakhir masa perodesasinya sebagai anggota DPRD Makassar September 2024 mendatang.

Selain ARA yang sehari-hari menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, ada sejumlah politisi lainnya yang masuk dalam daftar 15 nama yang beredar. Di antaranya nama-nama yang selama ini menghiasi percaturan politik di kota daeng. Diantaranya ada nama mantan calon walikota Makassar yang juga ketua PDP Golkar Munafri Arifuddin bersama calon wakilnya di Pilwali 2018 yang juga Ketua Nasdem Makassar, Rachmatika Dewi.

Nama Wakil Walikota Makassar, Fatmawati Rusdi juga ada di dalam deretan nama yang digadang-gadang bakal naik kelas menjadi 01 di Makassar. Tak ketinggalan nama istri Moh Ramdhan Pomanto, Walikota Makassar, Indira Jusuf Ismail, juga masuk dalam radar Nitizen.

Selain itu Wakil Walikota periode pertama Danny Pomanto, Syamsu Rizal masih dilirik. Nama Irman Yasin Limpo pun masih punya magnet. Bersama nama lainnya ada Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo. Tak ketinggalan Sukriansyah S Latief dan politisi Partai Demokrat istri Ilham Arief Siradjuddin mantan Walikota Makassar dua period Aliah Mustika Ilham. Dr Fadli Ananda, mantan calon wakil Walikot ini juga dilirik.

Dari 15 nama tersebut ada tiga pendatang baru yang mulai memikat hati masyarakat. Mereka adalah dr Udin Malik, mantan Danny Pomanto dan Sanatkin Danny, salah satu putra Founder Bosowa Aksa Mahmud.

Nama terakhir adalah tokoh muda yang dikenal banyak berkecimpung di bidang olahraga dan kini menjabat Ketua

KONI Kota Makassar, Ahmad Susanto. Sosok Ahmad Susanto selama ini juga banyak melakukan aksi kegiatan sosial kemanusiaan lewat organisasi yang dipimpinnya, Simpul Muda. (riel)

RTQ Kritisi Penegakan Perda KTR di Makassar

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar Rachmat Taqwa Quraisy (RTQ) memulai kegiatan sosialisasi penyebaran produk hukum daerah (Sosper) tahun anggaran 2023, di Hotel Travellers, Jl. Lamadukkelleng Buntu, Rabu (26/01/2023).

Sosper kali ini mengangkat tema "Perda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok" menghadirkan narasumber, Andi Muhammad Imam Ilyas (Lurah Gusung), serta Al Hidayat Samsu (tpkoh pemuda).

Dalam sambutannya, RTQ mengungkapkan, Perda KTR ini hadir untuk memberikan lingkungan sehat dan udara yang bersih bagi setiap orang. Juga untuk kepada masyarakat, bukan hanya pembatasan penggunaannya tetapi juga peredarannya.

Utamanya di tempat keramaian dan di tempat pelayanan publik, seperti fasilitas pelayanan masyarakat, rumah ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum.

"Tujuannya perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan. Juga melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari asap rokok," kata RTQ.

Namun demikian, RTQ menilai, jika dilihat dari regulasinya, Perda Kawasan Tanpa Rokok ini telah disahkan sejak 2013 lalu, namun hingga kini penegakannya belum maksimal dilaksanakan. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi ketengah masyarakat.

Untuk itu RTQ berharap, melalui sosialisasi ini semakin meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak merokok

pada area publik yang dilarang.

"Perda KTR dapat terlaksana lebih optimal bila semua pihak berperan aktif mematuhi larangan merokok utamanya di area publik," tandas RTQ. (**/RIs)



RACHMAT TAQWA QURAISSY

Bangun Silaturahmi di Hari Imlek, Danny Sambangi Tokoh Tionghoa

DPRD MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto menyambangi kediaman sejumlah tokoh Tionghoa pada perayaan Imlek tahun 2023, Senin (23/1/2023).

Hal ini dilakukan untuk menjalin silaturahmi dan memperkuat toleransi antar umat beragama. Ada tiga tokoh yang disambangnya. Pertama, Danny sapaan Ramdhan Pomanto berkunjung ke kediaman penasehat hukum papan atas, Lucas. Di sini Danny bertemu dengan Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo dan beberapa kerabat lainnya.

Mereka berbincang santai sambil menikmati kudapan yang disediakan. Danny pun tak lupa memberikan ucapan dan doa secara khusus kepada tokoh Tionghoa yang merayakan Imlek.

Kedua, ia mengunjungi kediaman

Anggota DPRD Kota Makassar, Eric Horas dan terakhir ia menyambangi rumah kediaman pengusaha gas dan minyak bumi, Ayong di Jalan Letjen Hertasning.

"Selamat merayakan imlek, semoga tahun ini penuh berkah, berlimpah rejeki, dan kebaikan berdatangan secara lapang. Seperti lapangnya hati semua tokoh Tionghoa," ucap Danny.

Ia juga berpesan kepada masyarakat untuk memperkuat toleransi antar umat bisa hidup berdampingan sehingga bisa bersama-sama kompak memajukan kota Makassar menjadi lebih baik.

Pada kesempatan yang sama, Danny menyampaikan, menjalin silaturahmi penting untuk memperpanjang umur, saling mendoakan dan memaafkan salah, dan khilaf. Karena menurutnya, ini salah satu kunci untuk Kota

Makassar yang lebih aman.

"Kita ramai menyambut. Baik itu Imlek, Natal, Idul Fitri dan Idul Adha nantinya. Semuanya bahagia dan saling mendoakan kebaikan dan berbagi keberkahan," pungkasnya.



ERIC HORAS

Anggota DPRD Makassar Sangkala Saddiko Gelar Sosper Pengelolaan Sampah

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar Sangkala Saddiko memulai kegiatan sosialisasi penyebaran produk hukum daerah tahun 2023, di Hotel Sarison, Jl. Perintis Kemerdekaan, pada Jumat (20/1/2023).

Sosialisasi kali ini mengangkat tema "Perda No. 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah" menghadirkan dua narasumber, yakni H. Dahyal, S.Sos, M.Si (Sekwan DPRD Makassar) serta pemerhati lingkungan Nur Hamsinah, S.Ag.

Seperti biasa, kegiatan dihadiri sekira 100 peserta yang didominasi warga Kecamatan Biringkanaya. Dalam sambutannya, Sangkala Saddiko mengatakan, sosper ini untuk memberikan edukasi masyarakat dalam hal pengelolaan lingkungan yang baik meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak lagi sembarangan membuang sampah.

"Sampah jika dikelola dengan baik akan dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan," tutur Sangkala Saddiko.

Menurut Sangkala Saddiko, persoalan sampah ini tidak bisa diserahkan kepada Pemerintah Kota saja, akan tetapi mesti melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat utamanya dalam hal pemilahan sampah sehingga masyarakat tak sekedar membuang sampah ditempatnya namun dapat mengelolanya sehingga bernilai ekonomis.

"Kalau kita bisa lakukan dengan baik, maka saya yakin dan percaya sampahta' yang ada dirumah bukan lagi menjadi masalah tetapi dapat mendatangkan berkah yang bernilai ekonomi," tuturnya lagi.

Untuk itu, pemilik tagline SS BRO ini mengajak peserta sosialisasi untuk memanfaatkan kesempatan ini dan

mengikuti secara seksama pemaparan kedua pemateri yang dihadirkan.

"Sebentar, ada ruang tanya jawab, bisaki bertanya kepada kedua pemateri kita. Manfaatkanki kesempatan ini sehingga tujuan sosialisasi ini dapat tersampaikan dengan baik. Minimal menjadi pengetahuan baru bagi kita semua," tandasnya. (*./yud)



SANGKALA SADDIKO

Legislator DPRD Makassar Andi Hadi Ibrahim Sosper KTR

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar Andi Hadi Ibrahim Baso memulai kegiatan sosialisasi penyebaran produk hukum daerah tahun anggaran 2023, di Hotel Dislaah satu hotel di, Jl. Pandang Raya, belum lama ini.

Pada Sosper kali ini mengangkat tema "Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok" menghadirkan narasumber, Doktor Basri Mahmud (Akarademi), Doktor Eliana Muis (Dokter Spesialis Penyakit Dalam).

Pada kesempatan itu Legislator Makassar Andi Hadi Ibrahim ini mengungkap pentingnya Perda KTR disosialisasikan kepada masyarakat, bukan hanya pembatasan penggunaannya tetapi juga peredarannya.

"Ada tempat-tempat yang harus menjadi perhatian kita semua, bahwa tempat itu adalah kawasan tanpa rokok, olehnya sadarki, jagaki, dan tegurki kalau ada kawasan sebagai Kaawasan Tanpa Rokok," papar Ustadz Hadi.

Sementara, Dr. Basri Mahmud selaku narasumber memaparkan, lahirnya Perda ini untuk udamera bersih dan untuk melindungi kesehatan masyarakat, perorangan dan keluarga. Juga untuk melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari rokok.

"Di Perda ini diatur ruang publik yang menjadi kawasan tanpa rokok, di fasilitas kesehatan, fasilitas belajar mengajar, tempat bermain,

angkutan umum, tempat kerja, kantor lemerintah, dan tempat lainnya seperti Hotel, Restoran, Supermarket, Bioskop, dan tempat wisata," cetusnya. (**/RIs)



ANDI HADI IBRAHIM BASO

Politisi PAN Tutup Usia, William Laurin Berduka

DPRD MAKASSAR - Wakil rakyat dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Makassar, Zaenal Daeng Beta tutup usia.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar ini dikabarkan meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2021, malam di Rumah Sakit Faisal Makassar.

Kepergian Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Makassar ini membuat William Laurin sangat berduka. Pasalnya, sebagai sesama wakil rakyat di Kota Anging Mammiri, Ketua Komisi B ini menilai jika almarhum Zaenal Beta adalah sosok orang yang sangat baik.

"Almarhum adalah sosok yang kami anggap jadi panutan. Walaupun beliau sangat tegas, tapi etap penuh canda, Almarhum juga memiliki wawasan yang luas, khususnya dalam permasalahan masyarakat," ucap William, Ahad (10/1/2021)

Maka dari itu, dirinya berharap agar keluarga yang telah ditinggal tetap diberi ketabahan dan kesabaran.

Bahkan, dia meminta kepada seluruh masyarakat Kota Makassar untuk mendo'akan legislator 4 periode ini.

"Mari semua kita berdo'a untuk almarhum, semoga beliau tenang

dialam disana. Selamat jalan Om Zaenal Daeng Beta," tukasnya.



WILLIAM LAURIN

Dorong Pemuda Jalankan Roda Perjuangan, Wahab Tahir: Mereka Harapan Bangsa

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kepemudaan, di Hotel Whiz Prime Makassar, Sabtu (28/1/2023).

Ketua Fraksi Golkar DPRD Makassar ini mengingatkan kepada para orang tua untuk tetap menjadikan pemuda sebagai harapan dalam memajukan bangsa.

"Wariskanlah kecerdasan dan keimanan kepada pemuda kita, karena anak muda lah ke depan yang akan menjalankan roda atau mewarisi perjalanan bangsa ini," ujarnya.

Menurutnya, peran pemuda di tengah masyarakat seyogyanya mengambil bagian dari kerja-kerja kebermanfaatannya yang telah diwariskan oleh pendiri bangsa.

"Kita yang tua-tua ini lambat atau cepat kita akan diberikan kalau tidak dipersiapkan oleh Tuhan kita akan dipersiapkan oleh manusia," terang AWT akronim Legislator tiga periode ini.

Tokoh Agama, Ustadz Muhammad Asdar hadir sebagai narasumber mengatakan generasi mudah sekarang seperti sudah kehilangan arah, berarti ketika mereka sudah hilang arah dan tujuannya maka

hidupnya akan berakhir tanpa arah pula.

"Makanya lahir peraturan daerah ini tentang kepemudaan untuk menjaga kembali bagi seorang pemuda bahwasanya pemuda itu hadir untuk senantiasa menjadi tonggaknya negara bangsa Indonesia, rusaknya pemuda itu pertanda hancurnya suatu negara," katanya.

Sebagai contoh, sahabat Nabi Muhammad SAW dahulu yakni Umar bin Khattab merupakan sosok pemuda pejuang Islam yang dijuluki singanya Allah, karena dengan tangguh dan Istiqomahnya, banyak yang tunduk dan hormat kepada dia.

"Bayangkan kira-kira kalau tidak ada lagi pemuda seperti Umar bin Khattab, yang memberikan contoh dan teladan ditengah masyarakat, maka hilanglah daya hidup kita sebagai bangsa yang besar," jelasnya.

Sementara, Kabid Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan Kota Makassar, Panca Nur Wahidin menyampaikan suatu proses pembangunan bagi kepemudaan secara umum adalah bagaimana seorang pemuda mampu bertanggungjawab, punya jiwa kepemimpinan dan berakhlak mulia.

"Masyarakat perlu ketahui bahwa pemuda yang ada dalam Perda ini ataupun ada dalam rancangan besar dari pemerintah founding father kita yaitu pemuda yang punya keimanan dan ketekwaan atau pemuda yang berakhlak dan bertakwa," jelasnya.

Untuk melihat perannya, kata Panca, bagaimana pemuda bisa menempatkan dirinya mulai dalam keluarga, lingkungannya dan kehidupan bermasyarakatnya dengan hal-hal yang positif.

"Jadi profil pemuda yang diharapkan oleh bangsa dan daerah adalah mandiri, demokratis, kreatif serta jiwa kepeloporannya mampu membangun dan menghasilkan kebermanfaatannya," cetusnya.



ABDUL WAHAB TAHIR

Ari Ashari Harap Orang Tua Pahami Kewajiban dan Hak Perlindungan Anak

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham menekankan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang didasari pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari.

“Di kota Makassar ada beberapa kejadian terkait anak-anak yang mulai meresahkan. Sebagai orang tua, kita memiliki tanggung jawab penuh terhadap anak walaupun anak berada di sekolah atau dimana saja,” ujarnya.

Hal ini diungkapkan legislator Partai Nasdem ini saat membuka kegiatan Sosialisasi angkatan 2, Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak di Hotel Almadera, Sabtu (28/01/2023).

Dengan melibatkan sebagian besar

tokoh masyarakat kecamatan Tamalate, kegiatan ini menghadirkan dua narasumber yaitu Camat Tamalate, Emil Yudianto Tajuddin dan Akademisi, Nasaruddin Natsir.

Di akhir kegiatan, Ari Ashari berharap, dengan adanya sosialisasi ini para orang tua terkhusus kaum ibu – ibu mengerti dan paham akan perlindungan dan hak anak yang sudah dilindungi dengan landasan hukum sebagaimana Perda yang dimaksud.

“Anak adalah harapan dari orang tua dan generasi penerus bangsa yang memiliki hak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak karena suatu bangsa tindakan pernah akan maju bila anak - anak generasi penerus bangsa ini tidak diperhatikan mulai dari awalnya,” terangnya.

Akhir sosialisasi Ari berharap dengan adanya Perda ini, ke depannya tidak ada lagi anak terlantar, juga tidak ada lagi anak yang tidak sekolah, dan tidak ada lagi anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak. (Sat)



ARI ASHARI ILHAM

Azis Namu : Pengusaha Rumah Kost Harus Mendukung Program Pemerintah

DPRD MAKASSAR - Perkembangan Kota Makassar yang semakin meningkat seiring dengan tersedianya berbagai fasilitas dibidang pendidikan, jasa dan perdagangan serta fasilitas pemerintahan, sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang dan bertempat tinggal, baik untuk sementara maupun untuk menetap dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan rumah kost atau pondokan disamping hotel dan penginapan.

Maka untuk menjaga atau menghindari implikasi negatif yang semisal, perbuatan asusila, penyalahgunaan narkoba serta perbuatan lainnya yang melanggar lainnya, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Pengelolaan Rumah Kost.

Hal ini di ungkap Anggota Komisi C DPRD Makassar, Ir. H. Abdul Azis Namu, SE, M.Si ketika membuka Kerundang Sosialisasi Peraturan Kerundang Undangan Kota Makassar Angkatan I (pertama) tahun anggaran 2023 di Tree Hotel Makassar yang mengangkat tema Perda nomor 10 tahun 2011 tentang “Pengelolaan Rumah Kost”, Kamis (26/01/2023).

Menurutnya, pemilik rumah ataupun pengelola wajib memenuhi izin dari pemerintah setempat serta mampu menjaga dan merawat lingkungan sekitar baik itu dari segi keindahan, kebersihan dan keamanan.

Legislator senior Partai PPP ini juga berharap para penghuni kost agar selalu bersosialisasi dengan masyarakat setempat dan menjalankan program pemerintah serta memahami kultur budaya dan adat istiadat setempat.

Kegiatan ini menghadirkan bapak Syarifuddin Mahmud, SH dan saudara Rais selaku narasumber yang menambah wawasan dan pencerahan materi, serta ibu Rini Susanty selaku moderator acara yang dihadiri sebahagian besar dari kelompok warga Kecamatan Panakukang dan Manggala.



ABDUL AZIS NAMU

Budi Astuti Minta Pembangunan Tidak Abaikan Aspek Lingkungan

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar Budi Hastuti meminta seluruh proyek pembangunan memperhatikan seluruh aspek. Khususnya mengenai lingkungan.

Hal itu disampaikan Budi Hastuti saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di Hotel Whiz Prime, Jalan Jenderal Sudirman, Sabtu (28/1/2023).

Legislator dari Fraksi Gerindra ini menyampaikan bahwa lingkungan saat ini sudah mulai rusak. Ia mengingatkan pemerintah dan investor tidak memperparah kondisi yang ada.

"Kita ambil contoh seperti banjir itu diperhatikan. Banyak daerah resapan air yang dijadikan sebagai perumahan," ujar Budi-sapaan akrabnya.

Anggota Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Makassar ini juga meminta adanya perencanaan matang sebelum memulai pembangunan. Ia ingin adanya pembangunan berkelanjutan

dengan memperhatikan lingkungan sekitar.

"Kalau ini diperhatikan, Makassar bisa jadi percontohan kota ramah lingkungan dan investor kian banyak melirik," tambahnya.

Sementara itu, narasumber kegiatan, Babra Kamal menyebut upaya menjaga lingkungan terus digaungkan. Ia mengingatkan agar pembangunan tidak menjadi biang kerusakan lingkungan di tengah usaha pelestarian dilakukan.

"Kita tahu banyak perjanjian dan pertemuan yang membahas bagaimana menjaga lingkungan seperti Stockholm Conference. Upaya ini kita tidak boleh biarkan sia-sia begitu saja, kita harus turut menjaga lingkungan," ucapnya.

"Banyak potensi memang seperti di Makassar. Nah, kita inginkan adanya pembangunan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan lingkungan," tambah Babra.

Terakhir, Puspito Hargono juga mengingatkan kesadaran semua pihak perlu ada. Mereka bisa berpedoman pada perda lingkungan

hidup yang diterbitkan oleh DPRD Makassar.

"Tentu keterlibatan semua pihak khususnya masyarakat. Percuma kalau kita terus kampanye tapi tidak ada kesadaran," jelas Popi-sapaan akrabnya.

Juga, kata dia, terkhusus setiap pembangunan sudah harus bisa melestarikan lingkungan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Budi Hastuti. "Ini perlu biar tidak menyusahkan juga masyarakat sekitar," tutupnya. (*)



BUDI HASTUTI

Ranperda Anti LGBT, Ini Kata Syamsuddin Raga

DPRD MAKASSAR - DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan, kemungkinan bakal membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anti Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT) pada pekan depan.

Hal itu disampaikan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Makassar, Syamsuddin Raga.

Syamsuddin Raga menyebut bahwa saat ini Ranperda anti LGBT belum masuk dalam pembahasan. "Untuk LGBT belum," ujar Syamsuddin Raga, Selasa (31/1/2023).

Namun, kata Syamsuddin, pembahasan terkait Ranperda LGBT itu kemungkinan besar akan dibahas pada pekan depan.

"Mungkin satu pekan lagi ke depan baru pembahasan," ujar Syamsuddin Raga.



SYAMSUDDIN RAGA

Irwan Djafar Dorong Pemanfaatan Fasum-Fasos untuk Bidang Keolahragaan

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar, Irwan Djafar menilai proses pembangaran kedepan sangat dibutuhkan peran pemuda yang aktif, kreatif dan produktif dalam membantu pemerintah pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Hal itu disampaikan Legislator dari Fraksi Nasdem DPRD Makassar tersebut saat melaksanakan Sosialisasi Perda nomor 6 tahun 2019 tentang Kepemudaan, di Grand Maleo Hotel Makassar, Minggu (29/1/2023).

“Kalau pemuda itu dari umur 16 sampai 35 tahun. Kesempatan ini juga untuk bersilaturahmi kepada masyarakat untuk membahas bagaimana pemuda kita kedepan,” ujarnya.

“Sekarang semua serba mudah dengan majunya era teknologi, apapun bisa dikerjakan asal keinginan dan semangat dalam pengembangan kepemudaan terus dijaga,” terangnya.

Selain itu, Irwan Djafar juga berharap tempat-tempat fasilitas umum (Fasum) dan fasilitas sosial (Fasos) bisa dimanfaatkan sebagai wadah pemuda khususnya di bidang olahraga.

Narasumber pertama, Kabid Pengembangan Pemuda Dispora

Kota Makassar, Brian R Brahman mengatakan Perda ini merupakan turunan dari undang-undang kepemudaan mengatur usia pemuda, mulai dari usia 16 sampai 30 tahun.

“Berdasarkan data statistik kita saat ini ada sekitar 392 ribu anak muda dari total 1,7 juta penduduk di Kota Makassar,” ungkapnya.

Salah satu upaya Dinas Pemuda dan Olahraga pemerintah kota Makassar adalah bagaimana memberikan kegiatan ekstra kepada pemuda daripada nongkrong tidak jelas.

“Ada banyak sekali fasilitas dari pemerintah yang disiapkan kepada pemuda-pemuda di Kota Makassar dalam mengembangkan potensi yang di miliki,” jelasnya.

Sekarang, kata Brian, pemuda tidak boleh lagi dilarang ketika bermain gadget dan bermain media sosial, karena saat ini dunia digital dan kreativitas anak muda bisa terlahir dari softskill, pelatihan dan workshop.

“Kemarin kita sudah adakan pertandingan e-sport atau game online untuk pemuda-pemuda kita yang bermuara pada hobby gaming,” ujarnya.

Narasumber kedua, Abdullah Dg Rowa menyampaikan bahwa anak muda sekarang sudah bisa tenang, karena ada payung hukumnya yang

sudah diatur dalam undang-undang ataupun perda, beda dengan dulu.

“Apapun kebutuhan anak muda sekarang khususnya di bidang olahraga dan kepemudaan sudah ada di alokasikan oleh pemerintah, dan sangat muda ketika ingin mengembangkan potensinya,” ucapnya.

Paling penting, kata Dg Rowa, bagaimana keinginan dan minat pemuda di Kota Makassar bisa lebih ditingkatkan lagi agar anak-anak muda lainnya mau mengambil peran dalam pembangunan daerah.

“Inilah yang menjadi cambuk bagi pemuda kita dalam mengembangkan cabang olahraga apa dan kreativitas apa yang perlu dikembangkan lagi, jadi ayo pemuda siapkan saja diri dari sekarang,” pungkasnya.



IRWAN DJAFAR

Sosialisasikan Perda Pelayanan Kesehatan, Anwar Faruq Tekankan Soal Ini

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD Makassar dari Fraksi PKS, Anwar Faruq menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan, di Hotel Grand Town, Jalan Pengayoman, Kota Makassar, Ahad, 29 Januari 2023.

Dalam acara itu, mendampingi Anwar Faruq sebagai pemateri, yakni dr Nur Laila dan dr Nur Dzakiyah.

Menurut Anwar Faruq, pelayanan kesehatan harus menyentuh seluruh masyarakat Kota Makassar tanpa terkecuali.

Tidak boleh ada yang dikecualikan,

mau yang dari keluarga miskin, harus tetap memperoleh pelayanan kesehatan, karena itu merupakan hak mereka yang harus dipenuhi pemerintah berdasarkan jaminan undang-undang,” kata Ketua PKS Kota Makassar itu.

Anwar Faruq menjelaskan, dalam Perda Pelayanan Kesehatan tersebut disebutkan sejumlah poin-poin penting kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Olehnya, Anwar mengatakan, Perda Pelayanan Kesehatan ini sangat perlu untuk diketahui dan dipahami bersama, terutama lapisan masyarakat agar mengetahui akan

adanya tanggungjawab pemerintah dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan kepada masyarakat.



ANWAR FARUQ

Bantu Tumbuh Kembang Anak, Muh Yunus Edukasi Pentingnya ASI Eksklusif

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar, Muh Yunus HJ menggelar sosialisasi peraturan daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, di Hotel Marina, Jalan Andalas, Sabtu (28/01/2023).

Muh Yunus menghadirkan dua narasumber. Keduanya adalah Duta ASI sekaligus Direktur Umum PDAM Makassar, Indira Mulyasari Paramastuti, dan Ustadz Agung Wirawan. Dalam pemaparannya, Muh Yunus menyampaikan bahwa ASI eksklusif penting untuk tumbuh kembang anak. Olehnya, DPRD Makassar membuat peraturan sendiri terkait itu.



H.M. YUNUS HJ

Pemkot Siapkan Beasiswa Pendidikan, Fatma Wahyudin: Semua Anak Wajib Sekolah

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar, Fatma Wahyudin mendorong terus masyarakat untuk tidak perlu khawatir dan putus asa dalam menyekolahkan anaknya mendapatkan hak pendidikan.

Sebab, menurut Fatma, pemerintah bersama legislatif Kota Makassar sudah mengatur dalam peraturan daerah (Perda) penyelenggara pendidikan sebagai kewajiban pendidik dan mendapat pendidikan.

“Semua anak-anak harus sekolah, semua wajib sekolah, disinilah peran dan tupoksi dari dinas pendidikan,” kata Fatma saat menggelar Sosialisasi Perda nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, di Hotel Aston Makassar, Sabtu (28/1/2023).

Apalagi, kata Ketua Fraksi Demokrat DPRD Makassar ini, pemerintah pusat hingga daerah sudah banyak menyiapkan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu dan berprestasi.

“Jadi tidak ada alasan untuk tidak menyekolahkan anaknya, inilah fungsi dan tanggung jawab legislatif untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak anak dalam mengenyam pendidikan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Bidang PAUD dan SD Dinas Pendidikan Kota Makassar, Syarifuddin menjelaskan sekarang sudah ada program Kemendikbud yaitu program Indonesia pintar yang dikeluarkan pemerintah Indonesia untuk mendapatkan bantuan pendidikan.

“Cara mendapatkannya adalah dengan menghubungi operator sekolah yang bersangkutan, dan laporkan bahwa anak anda berprestasi dan kurang mampu,” jelasnya.

Bahkan, kata Syarifuddin, Pemerintah Kota bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) melalui lembaga beasiswa Basnaz (LBB) program menyediakan dana pendidikan bagi golongan kurang mampu.

“Ada juga beasiswa anak lorong, jadi sekarang pemerintah kota Makassar melalui Dinas Pendidikan sudah ada disiapkan 100 orang untuk SD dan 100 untuk SMP itu per tahunnya,” untkannya.

Terpisah, Kasubag Sekretariat DPRD Kota Makassar, Akbar Rasjid menyampaikan Perda penyelenggaraan pendidikan sejak tahun 2019 dan digodok oleh Fatma Wahyudin bersama anggota DPRD Makassar lainnya saat di Komisi D.

Dirinya juga meminta masyarakat jika ada keluhan dan aspirasi baik terkait pendidikan dan kesejahteraan sosial lainnya untuk tidak segan-segan mengadukan ke layanan Ajamma dari DPRD kota Makassar.

“Sekarang sudah gampang ketika kita semua ada keluhan, kritikan dan aspirasi soal pendidikan bisa langsung sampaikan ke layanan call center Ajamma di DPRD Kota Makassar,” jelas pria yang akrab disapa Kaka Ocha ini. (*)



FATMA WAHYUDIN

Marak Kriminal Jerat Anak, Nurul Hidayat: Peran Keluarga Harus Maksimal

DPRD MAKASSAR - Maraknya kasus akhir-akhir ini yang menjerat kalangan anak-anak perlu mendapat perhatian serius, baik bagi kehidupan berkeluarga, bermasyarakat maupun pemerintah setempat.

Hal itulah yang membuat Anggota DPRD Kota Makassar, Nurul Hidayat melaksanakan sosialisasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2018 tentang Perlindungan Anak, di Khas Hotel Makassar, Jumat (27/1/2023).

Bagi Nurul, setiap kasus yang melibatkan anak-anak perlu mendapat penindakan serius. Sebab, anak merupakan aset yang tak ternilai dimiliki oleh negara atau daerah.

“Jadi yang harus kita perhatikan adalah pembentukan mental anak, mulai dari rumah karena disitu pentingnya pengawalan dan pendidikan anak dari keluarga di rumah,” ujar Legislatur Fraksi Golkar Makassar ini.

“Kita berkaca saja pada kasus anak yang baru-baru saja terjadi di Kota Makassar, tidak pernah terlintas di akal kita apakah anak yang masih berusia SMP bisa terjerat kasus kriminal dan korbannya pun adalah anak,” ungkapnya.

Dalam sosialisasi Perda kali ini juga turut menghadiri narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kepala Bidang Perempuan, Hafidah Djalanie.

Hafidah menjelaskan bahwa yang dimaksud anak adalah anak yang setiap orang berusia mulai dari dalam kandungan sampai dengan berusia 18 tahun.

“Dalam hal ini sebenarnya ada 30 hak anak, tapi yang paling penting adalah hak mendapat identitas misalnya memperoleh akte kelahiran dan jaminan kesehatan serta pendidikannya,” jelasnya.

Saat ini, kata Hafidah, yang perlu menjadi perhatian lebih bagi perlindungan anak adalah mengaktifkan kembali salter warga di setiap kelurahan, agar setiap aduan warga bisa langsung ke salter yang disiapkan.

“Di Kecamatan Tamalate itu sudah ada salter warga untuk mengadukan apa saja permasalahan anak yang dihadapi, supaya juga para orang tua bisa langsung tahu setiap kali ada masalah yang melibatkan anaknya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Aulia Arsyad menyampaikan Dinas bertugas menyempatkan menyiapkan seragam sekolah bagi anak SD maupun SMP yang kurang mampu, dengan mendata warga putus sekolah.

Hanya saja, tugas dan tanggungjawab Dinas Sosial semakin hari semakin bertambah, bukan hanya masalah sosial dan kesejahteraan warga. Tapi juga

menertibkan kasus sosial yang marak melibatkan anak.

“Tapi yang sangat miris kalau kami melakukan razia atau patroli ke hotel, wisma atau tempat umum lainnya, pasti kebanyakan kalangan anak-anak perempuan. Ada yang berumur SMP bahkan sampai SD bersama dengan laki-laki,” terangnya.

Menurut Aulia, penyebabnya adalah kurangnya ilmu agama dan didikan dari keluarga sehingga anak-anak bisa terlantar begitu saja dan melakukan pergaulan bebas.

“Guru yang terdekat dari anak adalah ibu, sebagai contoh. Makanya orang tua utamanya ibu-ibu harus memberikan kalimat positif, didikan baik agar sikap dan perilaku anak bisa tertanam terus hingga dewasa,” cetus mantan Camat Wajo ini. (*)



NURUL HIDAYAT

Penataan Dapil, Hamzah Hamid Bilang Begini

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar Hamzah Hamid mengomentari terkuat usulan penataan Dapil oleh KPU kota Makassar. Menurut Ketua PAN Makassar ini, Penataan Dapil menimbulkan polemik di kalangan anggota Dewan.

Selain anggota dewan, usulan penataan Dapil ini juga menjadi bahan perbincangan di kalangan pengurus Partai.

“Secara akademik tidak bisa terbantahkan, penataan Dapil yang menjadi wacana terkuat perbincangan hangat di DPRD termasuk di kalangan partai,” ucapnya saat Bincang Politik Herald Sulsel di Warkop Daeng Anas, Sabtu (21/1/2023).

Secara umum, usulan penataan Dapil tidak disetujui oleh seluruh anggota

Dewan, usulan tersebut dianggap sangat terburu-buru dan tidak mempertimbangkan masukan dari anggota dewan.

“Secara pribadi teman – teman di DPRD tidak setuju dengan usulan tersebut. Partai Sudah mempersiapkan calegnya untuk bertarung namun terhalang karena adanya usulan ini,” lanjutnya.

Hamzah melanjutkan, usulan tersebut sudah sangat baik, namun untuk penerapannya tidak tepat jelang di pemilu 2024.

“Secara pribadi ini bagus, cuma waktunya yang tidak tepat,” ujarnya.

Politisi Fraksi PAN ini juga mengungkapkan, banyak persoalan yang harus diperhatikan oleh KPU

selain masalah penataan Dapil. Di lapangan, banyak penyelenggara pemilu, banyak penyelinggara dengan beberapa caleg.



HAMZAH HAMID

Warga Pampang Terkena Musibah, Mario David Salurkan Bantuan

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar, Mario David turun langsung menyalurkan bantuan untuk korban bencana angin puting beliung di Kelurahan Pampang, Kamis (5/1/2022).

"Hari ini saya Mario David Anggota DPRD Kota Makassar turun ke lapangan meninjau, mengevaluasi, dan memberikan bantuan kepada warga kita yang terkena musibah bencana angin puting beliung," kata politisi dari Partai Nasdem ini.

Berdasarkan laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar, setidaknya ada 19 Kelurahan dari 4 Kecamatan yang ada di Kota Makassar terkena dampak angin puting beliung.

"Memang bulan ini bulan bencana bagi kita di Kota Makassar karena kita dikepung banjir, angin puting beliung, pohon tumbang, dan banyak lagi. Dalam aksi lapangan yang saya lakukan hari ini, saya mengapresiasi betul kerja-kerja BPBD kita dan Dinsos yang tanggap. Karena inilah yang harus kita lakukan," bebernya.

Kata dia, turun langsung meninjau korban masyarakat yang terkena dampak bencana adalah hal yang sangat diinginkan masyarakat.

"Masyarakat terkena bencana yakni menginginkan bagaimana pemerintah hadir di tengah mereka memberikan perhatian bukan sekedar bantuan. Akan tetapi memberikan semangat bagi mereka," ujarnya.

Apapun bencana yang terjadi, kata dia, memang tidak bisa dihindari. Tetapi bagaimana bencana ini kehadirannya membawa hikmah yang luar biasa bagi masyarakat dan pemerintah.

"Rasa kegotong-royongan kebersamaan masyarakat dengan masyarakat tetangga-tetangga pemerintah. Masyarakatnya bersatu padu dan saling menguatkan. Semoga penanganan bencana kita semakin hari semakin baik," tandasnya.



MARIO DAVID

Peduli Kesehatan Bayi, Sahrudin Said Tekankan Pemberian ASI

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar, Sahrudin Said menyebut salah satu nutrisi paling penting untuk untuk bayi baru lahir adalah pemberian air susu dari ibunya.

Karena itulah, Legislator Fraksi PAN DPRD Makassar ini mengambil tema Sosialisasi Perda nomor 3 tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif, di Hotel Karebosi Premier Makassar, Ahad (22/1/2023).

"ASI eksklusif adalah pemberian nutrisi atau non makanan kepada bayi mulai umur 0-6 bulan. Mengapa penting? karena hampir semua manusia mulai bayi pasti pernah merasakan ASI," ujarnya.

Ajid sapaan akrab anggota Komisi D DPRD Makassar ini menjelaskan, begitu pentingnya pemberian ASI eksklusif sehingga pemerintah bersama legislatif mengeluarkan peraturan daerah.

"Makanya dengan adanya Perda ini, para ibu-ibu mempunyai kewajiban untuk memberikan bayinya ASI eksklusif, karena kenapa? Gizi paling penting yang didapatkan oleh bayi itu adalah ASI," terangnya.



SAHRUDDIN SAID

Ray Suryadi Arsyad: Perlindungan Anak adalah Tupoksi Kami

DPRD MAKASSAR - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, H. Ray Suryadi Arsyad, S.Ip menggelar Sosialisasi Peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 05 tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak.

Sosialisasi dilaksanakan di Karebosi Premier Hotel, Jl. Jend. M. Yusuf No. 1 Kel. Pattunuang, Kec. Wajo, Kota Makassar, Sabtu (28/01/2023).

Dengan menghadirkan dua narasumber yang mewakili dua generasi yakni Dra. Nuraeni (Pendiri Pelopor KWN Fatimah Az Zahrah) dan Imam Hanafi Harris S.STP (Lurah Pannampu).

Dalam sambutannya, H. Ray Suryadi Arsyad menjelaskan bahwa Sosper yang dilaksanakan diawal tahun 2023 ini membahas terkait Perlindungan Anak dikarenakan maraknya kasus yang terjadi akhir-akhir ini.

“Saya awalnya mengira itu cuma kasus yang hanya dikait-kaitkan saja, tapi ternyata kasus tersebut betul adanya” Ungkapnya.

Lanjut, ia mengatakan bahwa kehadiran DPRD Kota Makassar yakni berupaya untuk menjamin keamanan maupun kelayakan hidup bagi anak – anak.

“Salah satu hal yang menjadi konsentrasi kami di DPRD Kota Makassar adalah berupaya untuk kelayakan hidup untuk anak – anak” Jelasnya.

Tak hanya itu, H. Ray Suryadi Arsyad juga merancang undang – undang tentang kota layak anak.

“Selain dari rancangan Undang – Undang perlindungan anak, kami di DPRD Kota Makassar Melalui Komisi D telah rancangan perda baru tentang kota layak anak”

“Jadi kami nantinya akan sandingkan, bahkan bakal ada perda tentang kota layak anak. Sehingga keduanya dapat menjauhkan anak-anak kita dari sesuatu yang tidak diharapkan” Pungkasnya.

Sementara itu, Dra. Nuraeni selaku narasumber menceritakan beberapa

contoh kejadian yang belakangan ini menjadikan anak-anak sebagai korban, baik itu penculikan hingga pelecehan.

Oleh karenanya, ia menekankan bahwa pemenuhan hak dan keamanan anak tak lepas dari tanggung jawab orang tua.

“Kita harus menjaga anak kita, begitu dia tidak ada, segera cari” ujarnya.



RAY SURYADI ARSYAD

Peduli Tumbuh Kembang Anak, Hj Muliati Gelar Sosialisasi Perda Pendidikan

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD Makassar dari Fraksi PPP, Hj Muliati menggelar sosialisasi peraturan daerah (Perda) tentang penyelenggaraan pendidikan di Aerotel Smile Hotel, Sabtu (28/01/2023).

Hj. Muliati berpesan sengaja ambil tema ini karena untuk memulai perencanaan kegiatan pendidikan, karena pemerintah telah melakukan peraturan daerah tentang pendidikan.

“Pendidikan di Indonesia telah diatur secara sistematis demi kualitas berjalan, dan perlu mengatur bagaimana kualitas pendidikan mampu merata di daerah khususnya Kota Makassar,” tambahnya.

“Peran orang tua itu sangat mempengaruhi mental, akhlaq dan perlakuan. Bukan hanya disekolah, di rumah juga perannya orang tua lebih besar dalam pendidikan,” tegasnya.

“Walaupun dalam era teknologi sekarang anak sudah mulai aktif dengan dunianya sendiri, namun jangan sampai anak kita bergerak sendiri dengan tanpa aturan dan pengawalan dari orang tua,” tutupnya.



Hj. MULIATI

Galmerrya Kondorura Hadiri Musrenbang di Kelurahan Buntusu



GALMERYA KONDORURA

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar dari PDIP, Galmerrya Kondorura hadir Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), di Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea, Kamis (12/1/2023).

Kehadiran Galmerrya memenuhi undangan Pemerintah Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea melaksanakan Musrenbang.

Sejumlah masukan dan keluhan disampaikan masyarakat, salah satunya yakni persoalan air bersih di Kecamatan Tamalanrea.

Air bersih merupakan kebutuhan pokok dan persoalan air bersih yang dikeluhkan warga Buntusu harus menjadi perhatian khusus pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat.

Galmerrya Kondorura merupakan legislator DPRD Kota Makassar dari daerah pemilihan (dapil) 3 Tamalanrea dan Biringkanaya.

Kasrudi Dorong Pemuda di Manggala Ikut Berkontribusi ke Pemerintah

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD Makassar, Kasrudi menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kepemudaan, di Hotel Grand Town, Jl Pengayoman, Jumat (27/1/2023).

Kesempatan ini, hadir Narasumber Kegiatan Didis Abdi Abubaeda dan Sementara, peserta Sosialisasi Perda ini berasal dari Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakukkang.

Kata Kasrudi, dirinya mendorong pemuda khususnya di Kecamatan Manggala untuk berkontribusi ke pemerintah. Pasalnya, kelompok pemuda di kecamatan ini cerdas dan kreatif. Minimal membangun daerah Kecamatan Manggala.

"Anak muda itu penerus, kalau begitu mulai dari sekarang ayo pemuda di Kecamatan Manggala perlihatkan bahwa anak muda bisa memberikan kontribusi ke pemerintah," jelas Kasrudi.

Kasrudi menjelaskan, kasus perang kelompok yang acap kali dilakoni pemuda di Makassar tidak terjadi di Kecamatan Manggala. Indikasi ini memperlihatkan tingkat kecerdasan masyarakat. Perlu peran pemerintah, minimal memberikan

ruang. "Jadi, saya mengajak seluruh peserta untuk membantu menyebarkan perda kepemudaan. Bahwa ada hak dan kewajiban pemuda," ucapnya.

Pada kesempatan itu, anggota Komisi B DPRD Makassar ini memberikan apresiasi terhadap program Pemkot Makassar Jagai Anak. Lewat kebijakan itu, semua orang tua wajib melindungi anaknya, terutama mereka yang sudah tergolong pemuda.

"Kita apresiasi Pemkot Makassar dengan Jagai Anak ta. Bani yang banyak kejadian seperti penculikan. Ini harus kita galakkan," ujarnya.

Terpisah, Narasumber Kegiatan, Didis Abdi Abubaeda mengatakan, DPRD Kota Makassar mensahkan regulasi soal kepemudaan sangat tepat. Sebab, Perda ini membuat para pemuda memiliki payung hukum sehingga segala aktivitasnya mendapat dukungan pemerintah.

"Saya kira ini penting bahwa Perda ini membuat pemuda bisa lebih banyak bergerak positif," ucapnya.

Pemerintah, kata dia, harus ikut memberikan atau mendorong pemuda bisa berbuat lebih banyak

hal yang positif. Sebab, regulasi ini digodok bagaimana pemuda di Makassar bisa terarah, tanggung dan produktif.

"Tapi kadang pemuda, dalam hal mendasar jarang terlibat. Karena, mereka tidak diberi kesempatan sehingga hal ini dirubah persepsi masyarakat," ungkapnya.

Saat ini, dia menyebutkan pemuda harus jadi penggerak. Minimal melakukan hal-hal kecil seperti kerja bakti. Kalau ini sampai berhasil maka masa depan Indonesia diprediksi akan cerah," ucapnya. (*)



KASRUDI

Peduli Kaum Disabilitas, Arifin Kulle: Semua Berhak Peroleh Pelayanan Sama

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar, Arifin Dg Kulle berharap pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dapat memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan hingga hak kemudahan mengakses seperti masyarakat pada umumnya.

Karena itulah, Arifin Dg Kulle melakukan sosialisasi peraturan daerah (Perda) nomor 6 tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, di Khas Hotel Makassar, Sabtu (28/1/2023).

Menurut Legislator Fraksi Demokrat Makassar ini, penyandang disabilitas di Kota Makassar harus mendapat pemenuhan hak yang setara dengan masyarakat lainnya.

“Dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas ada beberapa saudara kita baik di jalanan maupun dalam penampungan disabilitas harus mendapat perlakuan sama dari pemerintah,” ujarnya.

Dengan lahirnya Perda tersebut, pria yang akrab disapa Arkul ini terus mendorong pengembangan bagi penyandang disabilitas dalam mengekspresikan potensi dan keterampilannya.

“Inilah pemerintah kota Makassar bekerjasama dengan legislatif melahirkan Perda ini untuk membantu dalam pemenuhan hak disabilitas, kita berharap tidak ada lagi diskriminasi kepada saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus,” terangnya.

Mantan Staf Ahli Walikota Makassar Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Dra Sittiara juga menyampaikan hal serupa. Menurutnya, penyandang disabilitas perlu mendapat perhatian khusus.

Apalagi, pemerintah sudah menyiapkan sekolah luar biasa bagi kaum disabilitas sesuai dengan derajatnya. Bahkan, ada pula yayasan dan sekolah pengembangan untuk memberikan pelayanan khusus.

“Jadi sudah ada diberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita untuk mendapatkan hak yang sama dalam mengembangkan potensi yang dimiliki, baik dari tuna netra, cacat fisik dan kesehatan mental mereka,” jelasnya.

Sementara, Akademisi ITB Nobel Indonesia, Sri Prilmyanti Awaluddin menjelaskan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas punya landasan dan azas yang sudah

diatur dalam undang-undang.

“Kita sering melihat lembaga sosial yang mempekerjakan kaum disabilitas di bidang UKM misalnya membuat kerajinan, itulah mereka berhak meningkatkan kesejahteraan,” jelasnya.

Bagi Sri, masyarakat juga punya kewajiban dan tanggung jawab kepada penyandang disabilitas ditengah kehidupan bermasyarakat.

“Misalnya mensosialisasikan, melaksanakan dan memberikan data atau informasi tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas kepada pemerintah atau aparat setempat,” Pungkasnya. (*)



ARIFIN DG KULLE

Warga Keluhkan Izin IMB, Fasruddin Rusli Katakan Ini

DPRD MAKASSAR - Masyarakat Kota Makassar saat ini masih sering mengeluhkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga DPRD Makassar berinisiatif membentuk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) bangunan gedung.

Anggota Komisi C DPRD Kota Makassar, Fasruddin Rusli mengatakan Ranperda ini sebagai bentuk penataan bangunan yang ada di Kota Makassar agar semuanya mudah dalam pengurusan IMB. “Karena sistemnya semua nanti melalui online,” katanya. Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menambahkan, regulasi tersebut juga bagian dari mengikuti perkembangan zaman, di mana masyarakat tidak lagi membawa berkas ke kantor namun tinggal diupload pada aplikasi.

“Semua persyaratan harus lengkap dan semua melalui sistem online. Jadi nantinya tidak ada lagi bangunan yang tidak memiliki izin,” ujarnya.



FASRUDDIN RUSLI



Soal Dana CSR, Nunung Dasniar Minta Pemkot Lebih Transparan

DPRD MAKASSAR - Anggota Kota Makassar, Nunung Dasniar meminta Pemerintah Kota Makassar lebih transparansi dalam pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang terkumpul dari perusahaan di Kota Makassar.

Hal itu juga, kata Nunung, sebagai sikap keterbukaan kepada masyarakat untuk melaksanakan CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dari perusahaan dalam proses pembangunan daerah.

Sebab, saat ini, Dewan CSR Pemerintah Kota Makassar terkesan bersikap masa bodoh dan malas bekerja, karena tidak adanya laporan yang masuk ke Legislatif soal aliran dana perusahaan yang terkumpul.

“Selama ini belum ada sama sekali laporan dari dewan CSR soal berapa jumlah dan dari mana saja dana perusahaan yang sudah

terkumpul,” kata Nunung saat menggelar Sosialisasi Perda nomor 2 tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, di Hotel Grand Maleo Makassar, Selasa (31/1/2023).

Menurut Nunung, jika dana CSR yang dikumpulkan dan digunakan kepada peruntukannya, pasti bisa membuat wilayah atau kawasan tanpa rokok, pemanfaatan mobil dan motor sampah di setiap Kelurahan serta pemeliharaan lingkungan.

Harusnya dana CSR bisa di publish agar masyarakat tahu aliran dana ini ke mana saja, kalau memang ini Dewan CSR tidak bisa bekerja mending diganti saja dengan yang mau bekerja,” tegas Legislator Partai Gerindra ini.

Karena itu, Nunung meminta agar Dewan CSR mesti memfokuskan upaya transportasi dana yang terkumpul untuk pembangunan kota Makassar kedepan, jangan melulu dibebankan oleh Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Di Makassar misalnya saja perusahaan transportasi online, gudang-gudang yang ada di Kima Daya. Kemana semua itu dana CSR? padahal dana CSR dalam setahun wajib 3 kali dikeluarkan dari perusahaan,” ungkapnya.



NUNUNG DASNIAR

Al Hidayat Samsu Ungkap Peran Pemuda Dalam Pembangunan Kota Makassar



AL HIDAYAT SAMSU

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar, Al Hidayat Syamsu, menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) nomor 6 tahun 2019 tentang Kepemudaan, di hotel Aston Makassar, Sabtu (28/01/2023).

Politisi dari Partai PDI Perjuangan tersebut mengatakan bahwa pemuda saat ini bisa mengambil peran dalam meningkatkan pembangunan kota Makassar.

“Pemerintah bertanggungjawab dan melaksanakan penyadaran, pemberdayaan potensi pemuda berdasarkan kewenangannya,” ujarnya. Lebih lanjut kata Dayat, sapaan karibnya, pada prinsipnya pembangunan kepemudaan berfungsi untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Sebagai Politisi termuda saat ini, Al Hidayat Syamsu memberikan motivasi kepada peserta Sosper.

“Kegagalan menjadi bukti bahwa kita sudah berani”, tegasnya. Hadir juga narasumber Drs. A. Saiful Islam Thahir dan Hj. A. Najmah S. Arida.

Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Mesakh Raymond Rantepadang Gelar Reses Pertama

DPRD MAKASSAR - Secara tegas Anggota DPRD Makassar, Mesakh Raymond Rantepadang akan mengawal seluruh aspirasi masyarakat, utamanya infrastruktur saat Reses Pertama Masa Sidang Pertama Tahun 2022/2023 di Jalan Sermani 3 RT 04 RW 07 Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakkukang, dikutip dari dprd.makassar pada Senin (2/1/2023).

“Soal drainase dan paving blok memang pekerjaan rumah bagi saya untuk terus mengawal wisata ini. Apalagi banyak dinamika di Pemkot, jadi ada beberapa saran tersendat. Makanya kita kawal lagi seruan warga ini agar bisa direalisasikan tahun 2023,” ungkap Fraksi Legislatif PDIP DPRD Makassar.

Lanjutan Legislator Daerah Pemilihan IV meliputi Kecamatan Panakkukang dan Manggala ini mengaku sudah menerima aspirasi warga seperti melakukan perbaikan sedimen saluran air, perbaikan tanggul untuk dilakukan pengerukan sehingga warga tidak menjadi langganan banjir.



MESAKH RAYMOND RANTEPADANG

Andi Suharmika Ingin Masyarakat Kelola Sampah Hingga Bernilai Ekonomis

DPRD MAKASSAR - Persoalan sampah di kota Makassar dihadapkan pada beberapa kendala, diantaranya tingginya angka timbunan sampah yang dipengaruhi bertambahnya tingkat pertumbuhan penduduk, sehingga volume sampah hingga saat ini dapat mencapai kurang lebih sekitar 1000 ton/hari.

Selain itu, masih rendahnya tingkat pengelolaan sampah dimana hanya sekitar kurang dari 10% yang berhasil diolah, atau didaur ulang.

Kendala ketersediaan sarana dan prasarana persampahan dan keterbatasan kapasitas dan daya tampung Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA), menjadi isu hangat yang sering muncul dalam persoalan pengelolaan sampah serta belum masifnya gerakan inovasi pengelolaan sampah baru dan rendahnya kepedulian masyarakat tentang pengelolaan sampah.

Hal ini diungkap Anggota Komisi C DPRD Makassar Andi Suharmika ketiga menggelar kegiatan

sosialisasi peraturan perundang-undangan Kota Makassar angkatan II (kedua) tahun 2023 yang diselenggarakan di Hotel Sorison, Jumat (27/01/2023) dengan mengambil tema Perda nomor 4 tahun 2011 tentang “Pengelolaan sampah”.

Lebih lanjut Putra tokoh masyarakat Tamalanrea dan Biringkanaya H. Andi Hasir ini mengatakan bahwa “Perda tentang pengelolaan sampah ini mempunyai peran penting dalam menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang tertuang dalam renstra dan rencana kerja.

Masyarakatpun wajib berkontribusi dalam program rencana tersebut dengan menjadikan sampah menjadi sumber penghasilan, tambahannya.

Kegiatan ini dipandu oleh Riny Susanti dengan menghadirkan Muhammad Takbir, SH, MH seorang akademisi dan Dr.Muhajir, SKM, M.Kes Kepala Bagian Umum Set DPRD Kota Makassar, yang masing - masing memaparkan bagaimana

persoalan persampahan sehingga dapat bernilai ekonomis serta penanganan dan pengelolaan persampahan ditinjau dari aspek kesehatan dihadapan warga Kecamatan Tamalanrea dan Biringkanaya. (fje)



ANDI SUHARMIKA

Temui Warga Antang, Supratman Janjikan Siap Kawal Aspirasi Warga

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar, Supratman kembali menyapa warga saat Reses Pertama Masa Sidang 2022-2023, Jl Pannara RT 04 RW 01, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala.

Dalam reses titik kedua ini, legislator dari Fraksi Partai NasDem ini banyak menerima keluhan terkait infrastruktur. Mulai dari rusaknya jalan hingga drainase yang buruk.

Disampaikan Supratman, pembenahan infrastruktur memang menjadi perhatian khusus. Sejauh ini, lewat upayanya, pembenahan infrastruktur sudah berjalan di sejumlah wilayah Kecamatan Manggala.

“Seperti perkejaan paving termasuk di Nipa-nipa itu sudah selesai.

Begitu juga dengan pengecoran jalan di blok 10 Perumnas Antang sudah dikerjakan,” ujar Supratman, dikutip dari situs dprd makassar pada Rabu (4/1/2023).

Terkhusus di Kelurahan Antang, Supratman juga memastikan seluruh infrastruktur pembenahan akan berjalan. Mengingat saat ini ia masuk dalam Komisi C DPRD Makassar Bidang Pembangunan.

“Saya sempat melanggar pemerintah kota terkait ini. Mereka bilang sudah masuk pengajuannya jadi tetap akan dibuat seperti drainasenya dan lampu jalan,” tambah Supratman.

Apalagi di beberapa lorong di Kelurahan Antang sudah masuk dalam program lorong wisata. Ia pun menyebut wilayah tersebut

akan menjadi skala prioritas untuk pembenahan infrastruktur. “Kalau sudah masuk daftar lorong wisata, hampir pasti ada anggarannya untuk tahun 2023 dan itu juga fokus pada infrastruktur,” ucapnya.



SUPRATMAN

Andi Pahlevi Ajak Masyarakat Berpartisipasi dalam Penerapan Perda

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar Andi Pahlevi, SE., MM menggelar sosialisasi Peraturan Daerah Kota Makassar No. 7 Tahun 2021 tentang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, Rabu (25/01/2023), di Hotel Royal Bay Makassar.

Hadir sebagai Narasumber Ikhsan Kasatpol PP Kota Makassar, Yasser Salahuddin sebagai praktisi hukum Sosial dan Anggota DPRD Kota Makassar Andi Pahlevi.

Politisi Gerindra Andi Pahlevi menyampaikan pentingnya sosialisasi ini sebagai upaya untuk menyebarluaskan kepada masyarakat bahwa ada kepastian hukum kepada kita semua menyusul penerapan ketertiban umum, menciptakan lingkungan tertib, aman, bersih, teratur dan nyaman.

“Saya berharap masyarakat semua ikut serta mensosialisasikan Perda ini dan jangan sampai informasinya

sampai disini, minimal kita sampaikan tetanggata, keluargata bahwa ada perda seperti ini,” ujar Andi Pahlevi.

Kasatpol PP Kota Makassar, Ikhsan berharap masyarakat turut adil dalam menjaga ketertiban umum. Ikhsan menganggap Perda tersebut tidak berjalan maksimal tanpa bantuan semua pihak.

“Saat ini kami dari Satpol PP Kota Makassar menjalankan Perda secara harmonis mengedepankan perlindungan masyarakat dalam melakukan penertiban. Jadi Perda ini tidak bisa maksimal tanpa bantuan masyarakat. Minimal Mengingatkan anak kita untuk menjauhi hal-hal negatif, dan tokoh-tokoh masyarakat harus turun membantu,” ungkapnya.

Sedangkan Yasser Salahuddin dari praktisi Hukum Senior menyampaikan dalam teori sistem hukum ada 3 sistem, yang *pertama* legal system yaitu terdiri dari struktur hukumnya, kalau undang-undangnya tidak ada orang tidak

bisa di hukum karena tidak ada aturannya. Yang *kedua* Legal Structure bahwa siapa yang menegakkan Perda ini, *ketiga* yang paling penting *Legal Culture* budaya masyarakatnya jadi ketiganya ini harus berjalan.

Menutup Andi Pahlevi menyampaikan berjalannya Perda ini juga membantu program pemerintah kota Makassar tentang “jagai anakta”.



A PAHLEVI

Kegiatan Reses pertama masa persidangan pertama Tahun sidang 2022/2023

DPRD MAKASSAR - Kegiatan Reses pertama masa persidangan pertama tahun sidang 2022/2023 kembali dilaksanakan oleh seluruh anggota DPRD Kota Makassar.

Anggota DPRD Makassar dari Fraksi Demokrat, Rezki mengawali resesnya di Jl Rappocini Raya, Lr 9, RT 01 RW 07, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Makassar.

Pada kesempatan itu, salah satu warga setempat, Mustari menyampaikan aspirasinya terkait jalanan di Jalan Rappocini Raya lorong 9 yang kurang lebih 200 meter butuh perbaikan.

“Karena jalanan disini sejak puluhan tahun lalu belum pernah ada perbaikan, karena itu kami mengusulkan kepada Ibu Rezki agar bisa diperhatikan jalanan tersebut,” ujarnya.

Selain itu, warga juga mengusulkan pengadaan sound sistem bagi

masyarakat RW 07 untuk dipergunakan dalam rangka sebagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

Mendengar sejumlah aspirasi dari masyarakat yang hadir, Rezki menyampaikan bahwa pihaknya akan selalu mengawal setiap permasalahan yang ada di Kelurahan Buakana.

“Insya Allah saya akan perjuangkan setiap aspirasi bapak dan ibu. Kemudian soal drainase kami minta secara rincinya panjang dan lebar agar kami bisa langsung berkoordinasi dengan Dinas PU Makassar,” kata Rezki dikutip dari mediata, pada Rabu (4/1/2023).

Anggota Komisi B DPRD Makassar ini berharap setiap aspirasi dan dengan sebaik-baiknya. Terlebih, tidak memilih berdasar politik uang.

maksimal.

“Karena semuanya harus jelas, apalagi Kota Makassar ini luas jadi perlu jelas titik dan alamatnya dimana supaya Dinas terkait bisa lebih detail lagi dalam melaksanakan tugas di lapangan,” jelasnya.



REZKI

Pemilu 2024, Muchlis Misbah Ingatkan Warga Hati-hati Memilih Pemimpin

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar, Muchlis Misbah mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur politik uang.

Mengingat pemilu 2024 sudah di depan mata dan itu menentukan para pemimpin rakyat kedepan. Apalagi, menurut politisi dari Partai Hanura ini, ada berbagai strategi yang sudah dipersiapkan oleh seluruh pelaku politik dalam selangkah Pemilu ataupun pemilihan calon wakil rakyat.

Namun, kata Muchlis Misbah, masyarakat seyogyanya harus terus mendapatkan edukasi politik. Salah satunya tentang bagaimana cara memilih pemimpin yang baik dan benar-benar bisa menjadi penyambung lidah kepada pemerintah.

“Pertama yang harus kita gencarkan

bahwa edukasi tentang politik uang. Meskipun sampai hari ini masih banyak yang melakukan, setidaknya bisa mengurangi,” kata Muchlis Misbah, Rabu (25/1/2023).

la meminta masyarakat ataupun yang sudah memiliki hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya nanti dengan sebaik-baiknya. Terlebih, tidak memilih berdasar politik uang.

Menurutnya, menjauhi politik uang sangat penting, karena sangat terkait dengan pembangunan dan masa depan bangsa Indonesia. Ia pun berpesan agar rakyat memilih berdasarkan rekam jejak dan karakteristik para calon pemimpin.

“Itulah kenapa masyarakat kita harus bela-belain menerima uang misalnya Rp100 ribu tanpa melihat seperti apa calon pemimpinnya. Nah, disitulah edukasi politik yang

baik harus terus digalakkan agar rakyat bisa memilih calonnya berdasarkan karakteristik dan rekam jejaknya,” jelasnya.



MUCHLIS MISBAH

Andi Astiah Imbau Masyarakat Sukseskan Program Jagai Anakta

DPRD MAKASSAR - Produk hukum terkait perlindungan anak butuh peran orang tua sebagai garda terdepan pengimplementasiannya, oleh karena itu Anggota DPRD kota Makassar Hj. Andi Astiah mengajak warga untuk mensukseskan program 'Jagai Anakta' oleh pemerintah kota Makassar.

"Walaupun pemerintah punya program Jagai Anakta', tetapi ini harus ada dukungan dari masyarakat itu sendiri selaku orang tua yang paling dekat dengan anak. Untuk itu mari kita sukseskan program ini," ungkapnya.

Ini disampaikan dirinya saat menggelar sosialisasi angkatan pertama mengenai Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2018

tentang Perlindungan Anak di Hotel Aerotel Smile, Jumat (27/01/2023). Turut menghadirkan dua narasumber yaitu, Pemerhati Anak M. Rusdi DM dan Sekretaris DPRD Kota Makassar H. Dahyal.

Legislator PKS DPRD Makassar ini juga mengatakan, sebagai salah satu orang tua khususnya ibu, diperlukan membimbing anaknya dengan baik. Terkhusus menyampaikan hal positif terhadap sang buah hati.

"Telah menjadi satu tantangan dalam hal mendidik anak di zaman sekarang dengan kemajuan teknologi informasi sangat berat dibandingi informasi masa sebelum era sebelumnya," pungkasnya. (Sat)



ANDI ASTIAH

Kontrol Peredaran Minuman Beralkohol, M Yahya Sosialisasikan Perda Nomor 4 2014

DPRD MAKASSAR - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Makassar M Yahya melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2022 Angkatan II bertema Peraturan Daerah Kota Makassar Kota Makassar Nomor : 4 Tahun 2014, Tentang Pengawasan dan Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, di Hotel Harper Makassar, Ahad (29/1/2023).

Disebutkan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Legislator asal Partai Nasdem ini, menyebutkan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol (minol) harus dilakukan di tempat khusus dan berizin.

"Penjualan minol harus berdasarkan ketentuan yang berlaku. Tidak berdekatan dengan rumah ibadah atau sekolah," ungkap M Yahya anggota DPRD asal Dapil Biringkanaya Tamalanrea.

Di berbagai negara, lanjutnya, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu.

Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan efek

samping gangguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku atau mabuk," ungkapnya.

Sementara Sekwan DPRD Kota Makassar, Dahyal, mengungkapkan, peraturan daerah, karena itu diketahui masyarakat, karena itu diselenggarakan sosialisasi.

"Perda sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Merupakan peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi," ungkapnya.



M YAHYA

Azwar Tegaskan Tidak Ada Lagi Anak di Makassar Putus Sekolah

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar, Azwar ST menggelar Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Sosper) nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Dihadiri ratusan peserta dari konstituen di daerah pemilihannya dan dua pemateri yakni H. Muhyiddin, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar dan Mohamad Arif, praktisi pendidikan.

Kegiatan Sosper ini sukses digelar di Tree Hotel Makassar, Minggu 22 Januari 2023.

Azwar memaparkan betapa pendidikan menjadi ujung tombak kemajuan bangsa baik secara akademik maupun pembentukan karakter.

"Penyelenggaraan pendidikan harus sesuai dengan tujuan pendidikan nasional," tutur Azwar.

Politisi PKS ini mengajak para pendidik, guru, tenaga pendidik agar menjadi penyelenggara pendidikan yang baik dan benar.

"Kualitas anak didik menjadi tanggungjawab berbagai pihak mulai dari orangtua, guru, dan tergantung dari leadership kepemimpinan seorang kepala sekolah," ungkap Azwar.

H. Muhyiddin, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar menjelaskan sudah menjadi kewajiban orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya dan memastikan mendapatkan pendidikan baik berkualitas.

"Karena anak-anak merupakan garda terdepan, garda emas kita. Bagaimana bisa menjadi garda terdepan jika tidak mendapatkan pendidikan baik," kata Muhyiddin.

Sementara Mohamad Arif, praktisi

pendidikan menambahkan tujuan pendidikan yakni mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban dan mencerdaskan bangsa. (*)



AZWAR

Sosialisasi Perda, Anton Paul Ingatkan Pemberian ASI Eksklusif

DPRD MAKASSAR - Legislator DPRD Kota Makassar, Anton Paul Goni (APG) menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Soper) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, di Hotel Tree Jalan Pandang Raya, Sabtu (28/01/2023).

Kegiatan ini dihadiri dua narasumber, yakni dr. Asfira Asmawat serta Emilia Harnani, S.ST, M.Kes (Ketua Bidan Kota Makassar).

Dalam sambutannya, Anton Paul Goni memaparkan pentingnya pemberian ASI Eksklusif untuk tumbuh kembang anak selama masa periode ibu menyusui. Bukan justru memilih susu formula.

"ASI Eksklusif itu lebih berkhasiat yang mengandung gizi yang tinggi dibanding susu formula," jelasnya.

Politisi PDIP ini meminta agar perda ini turut disosialisasikan ke tetangga atau keluarga lainnya bagaimana pentingnya ASI Eksklusif bagi bayi.

"Perda ini ada 16 Bab 37 Pasal. Nanti bisa kita tanyakan langsung ke kedua narasumber yang kita hadirkan sehingga kita sebagai ilmu yang kita peroleh tidak sia-sia kehadiran kita. Dan boleh juga disampaikan kepada tetangga atau keluarga kita supaya mereka tahu bagaimana pentingnya pemberian ASI Eksklusif," ujarnya.



ANTON PAUL GONI

Apiaty Amin Syam Tekankan Pentingnya Pendidikan dari Rumah

DPRD MAKASSAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar melaksanakan sosialisasi peraturan daerah (Sosper) Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Sosialisasi tersebut dilaksanakan di Hotel Aston, Jalan Hasanuddin, Kota Makassar, Jumat (27/1/2023). Dibuka dan dihadiri langsung oleh Anggota Komisi D, Apiaty Amin Syam.

“Ini kan merupakan hasil kajian dari Baramperda, menghasilkan peraturan daerah nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, artinya Sosper ini untuk menyebarluaskan produk hukum yang telah dibuat tentang penyelenggaraan pendidikan,” ujar legislator Golkar ini.

Ia berharap, agar sosper ini dapat memberi pemahaman terhadap regulasi tersebut. Masyarakat yang

hadir, menyebarluaskan kepada orang lain di lingkungannya.

“Artinya agar wakil dari masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memahami dan mengerti, dan tentu mengacu dan tentu ditindak lanjuti. Kemudian kami mengharap kepada mereka yang menghadiri Sosper ini bisa menindak lanjuti lagi, kepada saudara, teman, sahabat atau keluarga,” harapnya.

Apiaty yang juga merupakan Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar menuturkan, pendidikan tidak cukup hanya di sekolah, juga mesti dilakukan di rumah.

Menurutnya, ada tiga hal penting yang mesti dilakukan orang tua terhadap pendidikan anak.

Pertama mengutamakan sistem belajar mengajar dari orang tua ke anak, kedua lingkungan di mana

anak kita belajar untuk dikondisikan, dan terakhir agar selalu memotivasi anak.

“Tidak cukup pendidikan di sekolah, harus di rumah juga,” ujarnya.



HJ. APIATY AMIN SYAM

Nasir Rurung Sebut Pemuda Merupakan Aset Bangsa

DPRD MAKASSAR - Dewan Nasir Rurung, Pemuda Merupakan Aset Suatu Bangsa Anggota DPRD Kota Makassar, Nasir Rurung menyosialisasikan Peraturan Daerah (perda) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kepemudaan dan mengajak pemuda untuk menjadi generasi kreatif di era moderan

“Pemuda merupakan aset suatu bangsa. bahkan indonesia dianggap negara memiliki pemuda terbanyak di dunia,” ujar NR di Makassar, hotel Maleo (26/01/23)

Ia mengatakan tujuan perda itu adalah pemerintah ingin membentuk pemuda yang tangguh dengan kreatif dan religius.

Apalagi, indonesia mendapat bonus melimpah terkait anak muda

sehingga, tak hanya pemerintah saja tapi juga keluarga diharapkan mampu berkontribusi dengan membentuk anaknya menjadi pemuda berkualitas.

“Orang tua inilah yang menjadi dasar atau contoh membentuk anak muda sebab, kita ketahui anak muda ini generasi pelanjut dari pemimpin kita,” pungkas Nasir rurung

Sementara itu, salah satu narasumber sekaligus tokoh pemuda menyampaikan, regulasi ini menjadi payung hukum untuk melindungi dan memberdayakan para pemuda di Kota Makassar.

“Berdasarkan regulasi, pemuda itu berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab hingga

aktualisasi. Siapa itu pemuda, warga Indonesia yang berusia 16-30 tahun,” katanya



NASIR RURUNG

Evaluasi Kinerja Perumda Pasar, Begini Pandangan Hasanuddin Leo

DPRD MAKASSAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar akan melakukan pemanggilan terhadap Perusahaan Daerah (Perumda) Pasar yang dijadwalkan pekan ini.

Anggota Komisi B DPRD Makassar, Hasanuddin Leo pemanggilan tersebut hanya monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap Perumda Pasar, sejauh mana kerjanya selama ini.

"Baik soal bagaimana kinerja selama ini maupun yang akan dilakukan kedepannya," katanya.

Dirinya menyebutkan ada banyak

hal yang ingin ditanyakan. Apalagi pasca menjadi perusahaan daerah yang semakin baik. Terutama dalam pengelolaan pasar. Misalnya soal retribusi. "Itu kita mau lihat seperti apa upaya untuk meningkatkan PAD," ucapnya, Rabu (18/1/2023).

Termasuk, kata dia, soal pengelolaan Pasar Butung yang kabarnya hingga kini belum diambil alih. Padahal sudah ada putusan pengadilan yang memberi kewenangan untuk mengelola.

"Tapi apa alasannya kita mau panggil dan minta penjelasannya. Mungkin minggu ini kita monev," paparnya.



HASANUDDIN LEO

Irmawati Sila Minta Intens Sosialisasikan Pencegahan Kebakaran di Makassar

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar, Hj Irmawati Sila melakukan sosialisasi angkatan pertama soal Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2022 (Perda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya kebakaran, di Hotel Almadera Makassar, Jumat (27/01/2023).

Legislator Fraksi Hanura DPRD Makassar ini mengukir hadapan konstituennya mengajak masyarakat untuk memahami bersama tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya kebakaran. Hal ini menjadi tujuan Perda di kota Makassar.

"Saya mau kita semua disini mengetahui cara menanggulangi kebakaran di wilayah ta'. Untuk itu, saya undangki datang kesini untuk sama-sama mengetahui sudah Perda ini di Makassar. Adanya Perda ini dapat mengedukasi kita semua dan menyadarkan semua keluarga dan tetangga ta' bahwa penting untuk mengetahui tindakan yang kita lakukan atau saat terjadi kebakaran," ungkap Anggota Komisi D DPRD Makassar ini bahwa

Sosialisasi ini menghadirkan

narasumber, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar Hasanuddin, S.STP,M.si. dan Camat Tamalate, Emil Yudiyanto Tadjuddin.

"Kalau itu kita tahu dan bisa lakukan dengan baik bagaimana melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, maka saya yakin dan percaya tidak ada lagi namanya kebakaran dan itu bisa kita antisipasi. Saya juga mau ada nanti sosialisasi ke masyarakat mengenai hal ini," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar Hasanuddin menjelaskan ada beberapa hal yang masyarakat kurang mengetahui jika terjadi kebakaran. Bahkan kebanyakan terjadi selama ini masyarakat panik.

"Kita harus memahami tentang kesiapsiagaan dan, pengelola bangunan gedung serta instansi terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran. Untuk mencegah, kebakaran, untuk badan pengelola gedung dan rumah harus menyediakan peralatan penyelamat jiwa, akses pemadam kebakaran,

keselamatan kebakaran, dan kontrol keamanan untuk gedung dan rumah," jelasnya.

Apalagi, Kota Makassar termasuk wilayah padat penduduk serta banyak terdapat rumah dan tempat usaha yang sering terjadi peristiwa kebakaran.

"Kami menghimbau kepada warga untuk benar-benar memperhatikan cara mengantisipasi kebakaran sehingga nantinya bisa diterapkan dalam kegiatan sehari-hari," katanya. (ad)



IRMAWATI SILA

Banyak Warga Belum Nikmati Air Bersih, Imam Muzakkar Ingatkan PDAM

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar, Imam Musakkar menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar, di Hotel MaxOne

Melalui sosialisasi ini, Imam Musakkar menyampaikan bahwa masih banyak warga Makassar yang belum mendapat air bersih. Terkhusus untuk Kecamatan Panakkukang dan Manggala.

“Saat saya turun reses, ada di Kecamatan Panakkukang ternyata itu masih yang belum dapat air bersih. Ini juga dikeluhkan oleh warga di Borong, Manggala,” ungkap Imam Musakkar, dikutip dari trotoar pada Kamis (5/1/2023).

Politisi PKB ini meminta PDAM Kota Makassar untuk memindahkan juri masalah tersebut. Iya menegaskan seluruh masyarakat sudah harus bisa merasakan manfaat air bersih.

“Saya berharap PDAM bisa lebih peka sedikit. Masih ada warga yang belum dapat air bersih padahal di Perda sudah jelas tentang menyediakan kesetaraan air bersih,” tambahnya.

Anggota Komisi C Bidang Pembangunan ini mengatakan PDAM juga tidak tebang pilih dalam melakukan pelayanan. Seluruh masyarakat tanpa terkecuali mesti mendapatkan air bersih.

“Jadi ini sebagai catatan juga kepada PDAM bahwa kita butuh kesetaraan air. Mereka berhak

mendapatkan haknya walaupun mereka di ada di utara, atau di ujung Makassar,” tukasnya.



IMAM MUZAKKAR

Sosialisasikan Perda, Abdul Wahid Minta Orang tua Awasi Pemakaian Smartphone Anak

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD Makassar, Abdul Wahid menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak. Bertempat di Hotel Dalton, Jalan Perintis Kemerdekaan, Senin (30/1/2023).

Legislator dari PPP ini menghadirkan dua narasumber. Di antaranya, Kepala DPPPA Makassar, Achi Soleman dan Kasubag Tata Usaha DPRD Makassar, Muhammad Ikhsan Ashari.

Melalui sosialisasi ini, Abdul Wahid meminta orang tua untuk mengawasi pemakaian handphone pada anak. Ia menilai kasus terkait anak seperti prostitusi online dan penculikan kebanyakan dipicu karena penyalahgunaan gawai tersebut.

“Kalau kita berikan leluasa terhadap

anak untuk menggunakan hp, bisa saja yang dibuka itu sembarangan, terus dia mau cari tahu, apalagi ia tidak tahu itu hal negatif,” ujarnya.

Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Makassar ini juga mengatakan bahwa perilaku anak bisa banyak dipengaruhi oleh handphone. Sedangkan pengaruh dari bimbingan orangtua nihil.

“Akibatnya anak lebih banyak mencontohi yang di handphone. Mereka memang di rumah sama orang tua tapi orang tua tidak mengawasi, anak malah main handphone terus,” tambah Abdul Wahid.

Untuk itu, ia pun meminta orang tua untuk merujuk pada Perda perlindungan anak dalam mendidik anak. Juga melaporkan masalah anaknya ke DPPPA Makassar.

“Jangan sampai kejadian yang sama kepada anak kita terus berulang. Makanya perda ini lahir untuk mengatasi masalah itu,” tukasnya.



ABDUL WAHID

Hasil Asesmen Kepsek Belum Diumumkan, Begini Reaksi Yeni Rahman

DPRD MAKASSAR - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar belum juga mengumumkan hasil asesmen calon kepala sekolah. Padahal asesmen dilakukan sejak Oktober 2022 lalu.

Calon kepala sekolah telah mengikuti serangkaian asesmen mulai CAT, uji publik sampai wawancara.

Anggota Komisi D DPRD Makassar Yeni Rahman mendesak Pemkot Makassar segera mengumumkan hasil asesmen.

Yeni mengatakan, pemkot harusnya tidak menggantung status para kepala sekolah. Usai asesmen sudah bisa diumumkan hasilnya.

“Kenapa lama sekali kah menilai? saya pikir sudah trend aplikasi yang begitu selesai asesmen ada nilai untuk satu penilaian,” kata Yeni, Rabu (18/01/2023).

Yeni juga mempertanyakan terkait rekap penilaian kepala sekolah yang terbilang terlalu lama.

“Kalau ada indikator yang di-asesmen itu bisa gampang masuk nilainya. Paling lama itu 2 bulan, ini belum keluar pengumumannya,” bebernya.

“Secepatnya dibuka karena ini kepala sekolah juga was-was. Harusnya jelas kapan asesmen, kapan pengumumannya. Jangan digantung.”

Sebelumnya, 305 calon kepala sekolah jenjang SD dan 80 tingkat SMP mengikuti asesmen.

Tingkat SD, peserta yang mendaftar masih kurang dari kuota yang dibutuhkan yakni 314 posisi kepala sekolah. Sementara tingkat SMP sebanyak 55 posisi kepala sekolah dibutuhkan.



YENI RAHMAN

Minim Didikan Moral, Kartini Prihatin Perlindungan Anak Menurun

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar dari Partai Perindo, Kartini menilai kasus yang menyeret pada anak akhir-akhir ini disebabkan karena didikan moral dan perlindungan anak kian menurun.

Hal tersebut, menurut Kartini, pendidapan dan pencegahan terhadap perilaku anak semakin berkurang bahkan sudah abai dalam menentukan masa depan anak.

“Salah satu penyebabnya itu media sosial yang kurang diperhatikan setiap harinya,” ujar Kartini saat menggelar Sosialisasi Perda nomor 5 tahun 2018 tentang, Perlindungan Anak, di Khas Hotel Makassar, Minggu (29/1/2023).

Legislator Partai Perindo ini mencontohkan kasus anak yang baru saja viral, korban dan pelaku

penculikan yang berujung pembunuhan merupakan dari kalangan anak.

“Kita banyak mendengar berita terkait penculikan anak, yang mana kami di DPRD Kota Makassar sudah membuat regulasi bahwa anak-anak di Makassar harus mendapatkan perlindungan,” jelasnya.

Dari kasus tersebut, Kartini merasa sangat miris karena seharusnya anak adalah penerus dan harapan bangsa, namun malah melakukan perbuatan kriminal karena tergiur dari media sosial.

“Kepada masyarakat untuk tetap mengawasi anak-anak di rumah karena timbulnya masalah kepada anak itu karena peran orang tua yang kurang maksimal,” imbau Anggota Komisi D DPRD Makassar ini.



KARTINI

Sapa Warga Kassi-Kassi, Syukran Kahfi Sampaikan Ini

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar Syukran Kahfi kembali menggelar Reses Pertama Masa Sidang Pertama Tahun 2022-2023, di Jalan Hertasing, Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini.

Sebelumnya Legislator muda Partai Amanat Nasional (PAN) ini melakukan kegiatan yang sama di lokasi berbeda, yakni di Jalan Minasaupa, Kelurahan Minasaupa.

Dalam sambutannya, Syukran mengungkapkan, kegiatan reses ini bukan sekedar bertemu konstituen dan merebut simpati masyarakat tetapi merupakan kewajiban setiap anggota DPRD menjemput aspirasi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat secara utuh.

Untuk itu, Syukran berharap pada sesi dialog, warga menyampaikan aspirasi yang nantinya akan dicatat dan akan disampaikan langsung di

hadapan Walikota pada rapat Paripurna penyampaian hasil reses.

Jadi kalau ada usulanta, apakah itu menyangkut infrastruktur, drainase, atau masalah sosial lainnya, sampaikan maki disini. Saya tidak berani berjanji tapi Insya Allah akan saya perjuangkan,” kata Syukran dikutip dari makassar update, pada Jumat (6/1/2023).

Pada sesi dialog, Politisi muda Partai Amanat Nasional ini menerima aspirasi terkait perbaikan infrastruktur jalan dan pengerukan drainase. Juga terkait penerima bantuan sosial, PKH dan KIP serta bantuan UMKM

Menanggapi hal itu, Syukran mengaku, akan mengawal usulan tersebut dan akan berkoordinasi dengan komisi C bidang Pembangunan.

“Sebenarnya terkait infrastruktur

jalan dan drainase ini ada di Komisi C. Tapi Insya Allah akan saya kawal dan juga akan kita sampaikan langsung dihadapan pak Wali pada Rapat Paripurna penyampaian hasil reses,” ujarnya.



SYUKRAN KAHFI

Harry Kurnia Pakambanan Tampung Aspirasi Warga Berua

DPRD MAKASSAR - Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar, Harry Kurnia Pakambanan melakukan reses pertama sidang sidang Pertama tahun 2022/2023, di jalan Satria Kasih RW 03 RT 11 Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya.

Reses yang dilaksanakan di wilayah Perumahan Telkomas jalan Satria Kasih I Kelurahan Berua untuk daerah pemilihan III.

Dalam reses Anggota DPRD Kota Makassar Harry mengatakan, reses tersebut merupakan salah satu cara perwakilan rakyat untuk menerima aspirasi.

“Reses ini adalah program pemerintah yang akan kita dukung bersama, dengan tujuan menampung dan menerima keluhan dari masyarakat, jadi disinilah tempat kita sebagai

anggota dewan untuk menerima apa yang dikeluhkan oleh masyarakat, lanjut Harry mengatakan bahwa yang terpenting adalah anak kita harus sekolah,” ujar Harry dikutip dari situs dprd makassar, pada Jumat (6/1/2023).

Dalam masalah tersebut, Harry Kurnia Pakambanan menerima sejumlah keluhan masyarakat yang Salah satunya, Warga mengeluhkan terkait adanya beberapa drainase yang tersumbat dan harus dibersihkan utamanya di depan pos keamanan yang mengakibatkan sebagian rumah warga tergenang air.

Menanggapi hal tersebut, Harry mengaku bakal menyerap semua aspirasi warga di daerah konstituennya. Dia memastikan, seluruh keluhan-keluhan yang disuarakan akan dia tindaklanjuti

bersama pihak-pihak terkait dan Harry meminta agar dia menyampaikan apabila ada anak bapak/ibu yang belum sekolah, ajakny.



HARRY KURNIA

Walikota Dukung Ranperda Larangan LGBT yang Diinisiasi DPRD Makassar



DPRD MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto menyambut baik langkah inisiatif DPRD Makassar dalam menggodok rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang melarang perilaku penyimpangan seksual lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Dia pun mengaku sangat mendukung ranperda tersebut.

"Saya mendukung penyelamatan generasi kita terhadap mora-moral secara agama dan secara budaya kita tidak cocok," kata Danny kepada Wartawan, Senin (9/1/2023). "Saya dukung itu, sepenuhnya, tidak ada keraguan itu," imbuhnya.

Sebelumnya, Danny juga menyampaikan apresiasinya atas inisiasi Ranperda Larangan LGBT tersebut. "Kita perlu memberi apresiasi temen-temen DPRD atas Perda Inisiasi Untuk Khusud Perda LGBT," kata Danny kepada Wartawan, Minggu (8/1/2023).

Dalam pernyataannya, Danny juga menegaskan bahwa LGBT ini

merupakan perilaku yang tidak dibenarkan, baik oleh agama maupun negara. "Kita perlu penegasan soal itu, dalam sisi agama, dalam sisi negara. Di negara pun LGBT tidak diakui. Sehingga kita harus mewujudkan ini dalam hal yang lebih jelas," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Makassar, Mario David menyebut Ranperda Larangan LGBT ini tengah dipersiapkan untuk tahap penyusunan naskah akademik. Dalam penyusunan naskah akademik tersebut, pihaknya akan memimban dari kalangan akademisi hingga tokoh agama.

"Nah, ini yang kita harap ada masukan dari teman-teman akademisi, sosiolog, antropolog, sama tokoh-tokoh agama," ujar Mario kepada Media, Senin (9/1/2023).

"Kita coba inisiasi ini, keresahan, dan kemudian kita mohon masukan mereka, apa yang harus kita lakukan," imbuhnya. "Itu kan (Ranperda Larangan LGBT) teman-

teman inisiasi, satu karena melihat Kota Makassar ini kan sudah banyak perilaku LGBT yang mulai kelihatan ke permukaan," ujarnya

"Jadi seperti gunung es, kelihatan sedikit, tapi kan jangan sampai dia kayak gunung es ternyata wah besar di tengah-tengah masyarakat. Ini kita mau cegah," imbuhnya. "Seperti apa teknisnya, apa yang kita ini (lakukan), nanti setelah tahap naskah akademik, baru akan kita coba presentasi. Akan diuji kepada publik kan," ujarnya.

Namun, dia memberikan salah satu contoh sebagai gambaran besar langkah pencegahan yang akan dilakukan, yaitu melarang perkawinan LGBT.

"Salah satunya pasti mi tidak mungkin kita meng-ACC perkawinan antar LGBT kan, itu salah satu yang besar. Nanti kita coba menajamkan bagaimana pola hidup bersama di tengah masyarakat, nanti kita kombinasi lebih tajam nanti," jelasnya.

18 PARPOL YANG LOLOS

Peserta Pemilu 2024

DPRD MAKASSAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi menetapkan partai politik (parpol) yang telah memenuhi syarat untuk lolos dalam tahapan verifikasi faktual, sehingga parpol tersebut berhak menjadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Terbaru, ada partai umat yang lolos dalam tahapan verifikasi faktual.

Simak daftar partai yang lolos Pemilu 2024 berikut.

Adapun penetapan tersebut diatur dalam Surat Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan Parpol Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan Kabupaten atau Kota Tahun 2024.

Melalui hasil penelitian dan verifikasi faktual yang dilaksanakan KPU dari tingkat pusat hingga daerah, ditetapkan rekapitulasi nasional. Dari total 18 partai yang mengikuti tahap verifikasi faktual, semua partai dinyatakan memenuhi syarat di 34 provinsi serta lolos sebagai peserta pada Pemilu 2024

Seperti data yang dihimpun, berikut ini 18 parpol yang lolos sebagai parpol peserta Pemilu 2024.





DPRD Makassar Bentuk Ranperda Bangunan Gedung

DPRD MAKASSAR - Masyarakat Kota Makassar saat ini masih sering mengeluhkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga DPRD Makassar berinisiatif membentuk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) bangunan gedung.

Anggota Komisi C DPRD Kota Makassar, Fasruddin Rusli mengatakan Ranperda ini sebagai bentuk penataan bangunan yang ada di Kota Makassar agar semuanya mudah dalam pengurusan IMB. "Karena sistemnya semua nanti melalui online," katanya.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menambahkan, regulasi tersebut juga bagian dari mengikuti perkembangan zaman, di mana masyarakat tidak lagi membawa berkas ke kantor namun tinggal diupload pada aplikasi.

"Semua persyaratan harus lengkap dan semua melalui sistem online. Jadi nantinya tidak ada lagi bangunan yang tidak memiliki izin," ujarnya.

Sementara itu Koordinator Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Syamsuddin Raga mengemukakan, ranperda ini merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Karya, yang mana nantinya proses pendaftarannya tidak lagi melalui kelurahan, kecamatan hingga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

"Jadi semuanya nanti melalui sistem dan perangkat yang ada, tinggal melalui aplikasi, apakah itu nanti bentuk izin usaha maupun bangunan. Jadi semuanya kemudahan," jelasnya.



Pimpinan Daerah IPIM Makassar Silaturahmi Dengan Ketua DPRD Rudianto Lallo



DPRD MAKASSAR - Pimpinan Daerah Ittihad Persaudaraan Imam (PD IPIM) Kota Makassar didampingi Pengurus Teras Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang se Kota Makassar, Bersilaturahmi dengan Ketua DPRD Kota Makassar, Rudiyanto Lallo di Baruga Karaeng Matoayya Rujab Keta DPRD jalan Letjen Hertasning, tadi malam, Ahad 1 Januari 2023

Kunjungan Pengurus IPIM dalam rangka silaturahmi sekaligus membicarakan keberadaan Imam di Kota Makassar.

Ketua PW IPIM Sulsel, H. Masykur Yusuf memaparkan kondisi Imam di Kota Makassar perlu mendapat perhatian, baik tatakelola penempatan, wewenang tugas termasuk kesejahteraan para Imam.

Sekira lebih dari seribu Imam yang ada di Kota Makassar yang tersebar di masjid-masjid selama ini masih melaksanakan tugas

secara monoton, hanya memimpin shalat berjamaah, dan melayani persoalan keagamaan di wilayahnya diantaranya mengurus warga yang meninggal, khitanan, hingga urusan pernikahan.

Di sisi lain tingkat kesejahteraan Imam masih tergolong rendah, terlebih era kekinian kebutuhan sehari hari yang begitu mahal sehingga perlu mendapat perhatian.

“Tujuannya agar para Imam masjid fokus melaksanakan tugasnya dan tidak perlu lagi disibukkan dengan urusan persoalan kebutuhan rumah tangga” ungkap H. Masykur.

Ketua DPRD merespon untuk memperhatikan para Imam, yang memiliki tugas mulia di tengah masyarakat,

Imam memiliki tugas berat yang siang malam harus bersedia memberi pelayanan terhadap hajat keagamaan umat di Kota Makassar.

“Sejak anak dalam kandungan, urusan lahiran, khitanan, pernikahan, syukuran, hingga mengurus jenazah juga Pak Imam. Jadi dapat dikatakan kehadiran Imam sangat urgen di tengah masyarakat, tugas Imam mulai kelahiran sampai urusan jenazah umat menjadi tanggung jawab para Imam”

Adapun PW IPIM yang hadir dalam pertemuan ini antara lain, Ketua, Sekretaris, Bendahaea dan beberapa pengurus harian. Sementara dari PD IPIM Kota Makassar diwakili oleh Sekretaris, H. Ambo Sakka Ambo.



Sekwan DPRD Makassar Beri Bantuan Korban Banjir di Kecamatan Biringkanaya



DPRD MAKASSAR - Saat ini, Kota Makassar diguyur hujan lebat disertai angin kencang yang mengakibatkan beberapa lokasi terendam banjir.

Salah satu lokasi di Kota Makassar yang terendam banjir, yaitu Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanayya, Kota Makassar. Merespon kejadian tersebut, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Makassar H. Dahyal menyerahkan makanan siap saji kepada warga yang terdampak banjir, Jumat (17/02/2023).

Diketahui, 250 makanan siap saji



yang berupa nasi dos dibagikan

kepada masyarakat Kelurahan Katimbang sebagai bentuk kepedulian terhadap korban banjir.

Warga Katimbang tampak bahagia bisa menerima bantuan dari Sekwan DPRD Kota Makassar H. Dahyal ini. (*)





DPRD Makassar Setujui Nama Jalan Cenderawasih Diganti Jadi Opu Daeng Risadju

DPRD MAKASSAR - DPRD Makassar telah menyetujui usulan penggantian nama Jalan Cenderawasih menjadi Jalan Opu Daeng Risadju. Pergantian nama jalan ini selanjutnya diserahkan kembali ke Pemkot Makassar.

"Kemarin kita (Bapemperda) menyetujui saat rapat kemarin, silakan dilanjutkan. Namun juga mesti dikaji mendalam oleh pemerintah kota," kata anggota Komisi D DPRD Makassar Yeni Rahman saat dihubungi detikSulsel, Jumat (27/1/2023).

Meski disetujui, Yeni menuturkan masih ada beberapa catatan yang mesti menjadi perhatian Pemkot Makassar. Dia meminta Pemkot melakukan kajian lebih mendalam terkait rencana penggantian nama jalan tersebut.

"Hal yang perlu dikaji itu yang pertama adalah apa syarat dan urgensi perubahan jalan, itu kan harus kita pahami," ucapnya.

Yeni juga meminta Pemkot Makassar memastikan seluruh

administrasi warga di wilayah yang nama jalannya terganti bisa difasilitasi. Mulai dari KTP hingga sertifikat rumah diminta segera disesuaikan.

"Sertifikat, KTP, itu harus cepat terakses. Jangan sampai perubahan nama jalan itu bisa mengganggu proses administrasi masyarakat ketika mereka hendak mengurus sesuatu hal yang penting," imbuhnya.

"Menurut saya, pemberian nama jalan itu harus tematik. Misal ada seputaran jalan yang memang di situ nama-nama jalannya adalah pahlawan revolusi atau pahlawan kemerdekaan atau tokoh pendidikan dan lain sebagainya," katanya.

"Kemarin misalnya muncul usul nama Jalan Opu Daeng Risadju. Kita apresiasi karena dia mendapat penghargaan. Tapi kita harus tahu pemberian nama di jalan itu urgensinya apa," lanjutnya.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto telah menyampaikan rencananya

mengganti nama Jalan Cenderawasih menjadi Jalan Opu Daeng Risadju. Danny menyebut telah berkomunikasi dengan DPRD Makassar terkait pergantian nama tersebut.

"Inshaallah, saya sudah bicara dengan ketua DPR dan ketua DPR akan membantu kita semua, dan beberapa kandidat jalan juga (sudah) kami siapkan," kata Danny.

Keseriusan Danny untuk menyematkan nama Opu Daeng Risadju menjadi nama jalan di Makassar pun langsung ditunjukkan. Danny sudah menentukan jalan yang akan diganti namanya yakni Jalan Cenderawasih.

"Saya mengusulkan, ini usulan karena di situ ada Jalan Andi Mappanyukki, di sini (dekatnya) ada Jalan Cendrawasih. Barangkali Jalan Cendrawasih itu sebaiknya kita ganti nama orang dan saya kira sejajar dengan pahlawannya (pahlawan) nasional di situ," ujar Danny.

Dinilai Sistem Kehumasan Baik, Makassar Ditunjuk Jadi Tuan Rumah IGA 2023



DPRD MAKASSAR - Indonesia GPR Award (IGA) 2023 akan diselenggarakan pada bulan Mei mendatang. Kota Makassar ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggara. Hal itu diungkapkan langsung saat tim Humas Indonesia, Dwieky datang berkunjung ke Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, di kediamannya, Kamis (19/1/2023).

Indonesia GPR Awards IGA (2023) merupakan ajang kompetisi apresiasi dan berbagai pengalaman bagi praktisi kehumasan pemerintah di Lingkungan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, BUMN, anak usaha BUMD tentang praktik kehumasan.

CEO Humas Indonesia, Asmono Wikan mengatakan Kota Makassar ditunjuk karena dinilai sangat konsen dan peduli terhadap sistem kerja media dan kehumasan.

"Sejauh ini kami melihat Pak Wali sangat menjalankan fungsi humas

pada jalur yang positif. Dibandingkan dengan kepala daerah lain, masih banyak yang mengesampingkan kehumasan," ucapnya.

Padahal kehumasan pada suatu instansi sangat berperan penting bagi kesuksesan instansi tersebut.

Sementara, Wali Kota Makassar, Danny Pomanto sapaan Ramdhan Pomanto menyatakan kesiapan Kota Makassar sebagai tuan rumah dalam kegiatan nasional kompetensi kehumasan The 1st IGA 2023.

"Kami siap. Terimakasih karena telah memilih Makassar. Kegiatan-kegiatan nasional seperti ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi kota kami," sebutnya.

Untuk kehumasan sendiri, Danny membentuk tim PPID pada setiap OPDnya. Ia menghimbau agar setiap hari ada lima berita kegiatan, dalam seminggu itu ada satu berita nasional dan dalam sebulan ada satu berita viral.

Cara tersebut salah satu bentuk bagaimana peran kehumasan dan pemberitaan dalam menyampaikan informasi utamanya pada program-program prioritas Pemerintah Kota Makassar.

"Humas dan media memiliki peran strategis dalam diseminasi informasi. Menyampaikan ke publik program dan kinerja pemerintah agar masyarakat paham apa saja yang telah dijalankan selama ini," ungkapnya.

Ia juga mengatakan tulisan yang termuat dalam berita yang terbit itu dapat menjadi tolak ukur kinerja pemerintah.

"Ini fungsi pemberitaan yang sesungguhnya. Bagaimana kita menilai kinerja pemerintahan baik dari sisi kualitas pelayanan maupun kuantitas lewat berita yang disajikan di berbagai media, dari sini dapat diukur apakah fungsi pemerintahan telah berjalan sesuai relnya," pungkas Danny.

Dewan Ingatkan Agar Bangunan RSUD Daya Makassar Berbanding Lurus Kesejahteraan Nakes



DPRD MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus konsentrasi dalam menguatkan infrastruktur kesehatan. Salah satunya renovasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Daya Makassar.

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto telah mendorong pembangunan harus berjalan tahun ini. "Itu agar citra dan layanan di RSUD bisa lebih maksimal dan masyarakat merasakan itu," ucapnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar khususnya kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk menguatkan Sumber Daya Manusia (SDM) setelah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Daya Makassar direnovasi.

Anggota DPRD Kota Makassar, Hamzah Hamid

mengatakan hal tersebut mendapat dukungan penuh dari wakil rakyat. "Yang menjadi atensi Pemkot saat ini adalah SDM kesehatan yang juga harus diperkuat," ujar Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar yang membidangi Kesejahteraan Rakyat, Hamzah Hamid, Senin (9/1/2023).

Politikus PAN itu menilai yang selalu luput adalah penguatan SDM kesehatan. Baik dari segi

kemampuan maupun kesejahteraan tenaga medis.

"Jangan sampai bangunan sudah bagus, sementara tenaga kesehatannya masih ada yang pendapatannya Rp250 ribu per bulan. Serta masih kurang dokter-dokter spesialisnya," jelasnya

Ketua DPD PAN Makassar itu menilai yang selalu luput adalah penguatan SDM kesehatan. Baik

dari segi kemampuan maupun kesejahteraan tenaga medis. Terlebih, saat ini kata Hamzah, RSUD Daya jadi perhatian provinsi. Sebab sudah bisa menjadi rujukan madya.

Renovasi pembangunan RSUD Daya rencananya akan memiliki gedung 5 lantai dengan total kamar sesuai Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dari Kemenkes RI yakni 250 kamar.





Soal PSEL, DPRD Ingatkan Pemkot Hati-hati Kerja Sama dengan Investor

DPRD MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar Makassar mengingatkan pemerintah kota (Pemkot) agar berhati-hati melakukan kerja sama dengan investor persoalan proyek Pengelolaan Sampah Berbasis Energi Listrik (PSEL)

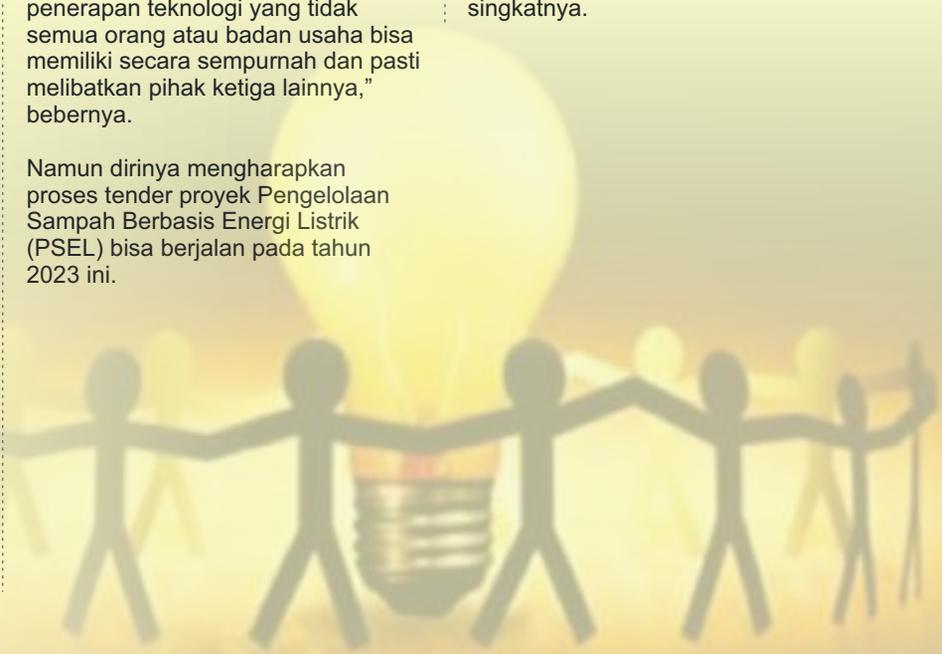
“Memang harus berhati-hati dalam menjalin kerja sama dengan investor karena ini menyangkut banyak hal, termasuk penggunaan teknologi ramah lingkungan,” kata Sekertaris Komisi A DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir, Senin (2/1/2023).

Politikus Golkar ini menyebutkan kehatian-hatian tersebut harus dilakukan karena proyek Pengelolaan Sampah Berbasis Energi Listrik (PSEL) tidak semua perusahaan memiliki teknologi.

“Harus menelisik seluruh calon investor secara hati-hati dan berkelanjutan karena menyangkut penerapan teknologi yang tidak semua orang atau badan usaha bisa memiliki secara sempurna dan pasti melibatkan pihak ketiga lainnya,” bebernya.

Namun dirinya mengharapkan proses tender proyek Pengelolaan Sampah Berbasis Energi Listrik (PSEL) bisa berjalan pada tahun 2023 ini.

“Tapi saya sangat berharap tahun ini sudah investornya yang memenuhi semua syarat-syarat dan aspek,” singkatnya.



Tahun Baru 2023 Eratkan Rasa Kekeluargaan, Wali Kota Rangkul OPD Lewat Family Gathering di Tokka



DPRD MAKASSAR - Mengawali tahun 2023, Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto menggelar Family Gathering di Tokka Tena Rata Kabupaten Maros, Sabtu (7/1/2023). Seluruh SKPD dan Perusda hadir memboyong pegawainya. Family Gathering ini dilakukan untuk mengeratkan tali silaturahmi antar pegawai baik dari SKPD maupun Perusda kota Makassar.

Dalam sambutannya, Danny sapaan Moh Ramdhan Pomanto mengungkapkan rasa terima kasih atas kehadiran seluruh unsur Pemerintah Kota Makassar walaupun kegiatan family gathering ini sempat fakum namun momen ini menjadi penting untuk berkumpul dan saling mengenal baik sesama pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Laskar Pelangi.

“Kegiatan ini selalu kami lakukan dua kali setahun waktu periode pertama saya. Ini rencana kami akan lakukan tiga bulan sekali untuk kita lebih dekat dan saling kenal,” ucapnya.

Keseruan acara Family Gathering ini terlihat saat para peserta sangat

antusias dalam mengikuti beberapa kegiatan dan lomba. Peserta juga dihibur dengan penampilan Jad & Sugi band dan DJ Tere.

Danny juga menekankan beberapa hal penting seperti kedisiplinan, kekompakan dan keseriusan SKPD dalam bekerja merealisasikan program-program strategis Pemkot Makassar.

Kata Danny, tiga poin ini akan menjadi penilaian Danny atas kinerja SKPDnya.

Pada kesempatan ini juga, Danny di hadapan seluruh jajaran Pemkot Makassar melepas dua ASN terbaiknya dikarenakan telah memasuki masa purnabakti yakni Andi Siswanta yang sebelumnya menjabat kepala BPSDMD dan Sittiara menjabat Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan & Pengembangan SDM.

Danny juga mengajak semua peserta Family Gathering untuk mendoakan tiga pegawainya yang telah berpulang ke rahmatullah yakni Mantan Kasatpol PP, Iqbal Asnan, Dirut RPH, Syafrullah, dan Sekretaris Bappeda, Hamka.

“Dua ASN kami ini telah memasuki masa purnabakti. Kami sangat terbantu dengan kerja-kerja beliau selama mendedikasikan dirinya untuk Pemkot Makassar. Jangan lupa kita juga mendoakan tiga pegawai kita yang telah berpulang ke Rahmatullah baru-baru ini,” tuturnya.

Danny sangat berterimakasih kepada dua ASNnya. Hal itu ditandai dengan pemberian cenderamata berupa plakat penghargaan.

Tak ingin kalah, Mantan Asisten III Pemkot Makassar, Sittiara juga membacakan puisi ciptaannya sendiri yang bertemakan rasa terima kasih dan penghormatannya kepada Danny Pomanto yang dinilai sudah menjadi pemimpin yang menginspirasi seluruh pegawainya.

“Puisi ini saya tulis semalam bentuk terima kasih saya kepada pak Wali, ibu Wawali dan ibu Ketua TP PKK Kota Makassar yang sangat menginspirasi saya selama bekerja di Pemkot Makassar,” tutupnya.



KOMISI A BIDANG PEMERINTAHAN

Meliputi:

- | | |
|---|---|
| a. Pemerintahan; | g. Organisasi Sosial Politik; |
| b. Ketentraman dan Ketertiban masyarakat; | h. Organisasi Masyarakat dan Pertanahan; |
| c. Media Massa; | i. Kependudukan |
| d. Hukum/Perundang-undangan dan HAM; | j. Umum; dan |
| e. Kepegawaian; | k. Informatikan Komunikasi dan Pengelolaan data Elektronik. |
| f. Perizinan; | |



H. RACHMAT TAQWA QURAI
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
KETUA KOMISI A
(Bidang Pemerintahan)



Hj. FATMA WAHYUDDIN
Wakil Ketua Komisi A
Fraksi Demokrat



ABDUL WAHAB TAHIR
Sekretaris Komisi A
Fraksi Golkar



H. IRWAN DJAFAR
Anggota Komisi A
Fraksi Nasdem



ANDI PAHLEVI
Anggota Komisi A
Fraksi Gerindra



M. YAHYA
Anggota Komisi A
Fraksi Nasdem



SYUKRAN KAHFI
Anggota Komisi A
Fraksi PAN



AL HIDAYAT SAMSU
Anggota Komisi A
Fraksi PDI Perjuangan



H. MUH. NASIR RURUNG
Anggota Komisi A
Fraksi PAN



ANWAR FARUQ
Anggota Komisi A
Fraksi PKS



H. M. YUNUS HJ
Anggota Komisi A
Fraksi Nurani Indonesia Bangkit



KOMISI B BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN

Meliputi:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| a. Perdagangan; | l. Koperasi dan UKM; |
| b. Perindustrian; | j. Pariwisata; |
| c. Pertanian; | k. Keuangan Daerah; |
| d. Perikanan dan Kelautan; | l. Perpajakan; |
| e. Peternakan; | m. Retribusi; |
| f. Perkebunan; | n. Perbankan; |
| g. Kehutanan; | o. Perusahaan Daerah; dan |
| h. Pengadaan Pangan/Logistik; | p. Dunia Usaha dan Penanaman Modal. |



ERIC HORAS
FRAKSI GERINDRA
KETUA KOMISI B
(Bidang Ekonomi dan Keuangan)



Hj. MULIATI
Wakil Ketua Komisi B
Fraksi PPP



ARI ASHARI ILHAM
Sekretaris Komisi B
Fraksi Nasdem



Hj. REZKI
Anggota Komisi B
Fraksi Demokrat



BUDI HASTUTI
Anggota Komisi B
Fraksi Gerindra



H. MUCHLIS A MISBAH
Anggota Komisi B
Fraksi Nurani Indonesia Bangkit



WILLIAM LAURIN
Anggota Komisi B
Fraksi PDI Perjuangan



H HASANUDDIN LEO
Anggota Komisi B
Fraksi PAN



H. SYAMSUDDIN RAGA
Anggota Komisi B
Fraksi Nurani Indonesia Bangkit



Hj. NURUL HIDAYAT
Anggota Komisi B
Fraksi Golkar



AZWAR
Anggota Komisi B
Fraksi PKS



KOMISI C BIDANG PEMBANGUNAN

Meliputi:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| a. Pekerjaan Umum; | e. Perhubungan; |
| b. Prasarana wilayah dan Permukiman; | f. Pertambangan dan Energi; |
| c. Tata Ruang Kota; | g. Jasa Telekomunikasi; dan |
| d. Kebersihan dan Keindahan; | h. Lingkungan Hidup |



H. SANGKALA SADDIKO
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
KETUA KOMISI C
(Bidang Pembangunan)



GALMERRYA KONDORURA
Wakil Ketua Komisi C
Fraksi PDI Perjuangan



H. ARIFIN DG KULLE
Anggota Komisi C
Fraksi Demokrat



ANTON PAUL GONI
Anggota Komisi C
Fraksi PDI Perjuangan



Hj. ANDI ASTIAH ASRI
Anggota Komisi C
Fraksi PKS



IMAM MUSAKKAR
Anggota Komisi C
Fraksi Nuran Indonesia Bangkit



SUPRATMAN
Sekretaris Komisi C
Fraksi Nasdem



ANDI SUHARMIKA
Anggota Komisi C
Fraksi Golkar



Hj. NUNUNG DASNIAR B
Anggota Komisi C
Fraksi Gerindra



H. ABDUL AZIS NAMU
Anggota Komisi C
Fraksi PPP



FASRUDDIN RUSLY
Anggota Komisi C
Fraksi PPP



KOMISI D BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

Meliputi:

- | | |
|------------------------------------|--|
| a. Ketenagakerjaan; | e. Agama; |
| b. Pendidikan; | f. Kebudayaan; |
| c. Ilmu Pengetahuan dan tehnologi; | g. Sosial; |
| d. Kepemudaan dan olahraga; | h. Kesehatan dan Keluarga berencana; dan |
| | i. Peranan Wanita |



ANDI HADI IBRAHIM BASO
FRAKSI PKS
KETUA KOMISI D
(Bidang Kesejahteraan Rakyat)



KASRUDI
Wakil Ketua Komisi D
Fraksi Gerindra



MARIO DAVID PN
Anggota Komisi D
Fraksi Nasdem



H. RAY SURYADI ARSYAD
Anggota Komisi D
Fraksi Demokrat



MESAKH RAYMOND RANTEPADANG
Anggota Komisi D
Fraksi PDI Perjuangan



YENI RAHMAN
Anggota Komisi D
Fraksi PKS



Hj. IRMAWATI SILA
Anggota Komisi D
Fraksi Nuran Indonesia Bangkit



H. SAHRUDDIN SAID
Sekretaris Komisi D
Fraksi Golkar



Hj. APIATY AMIN SYAM
Anggota Komisi D
Fraksi Golkar



HAMZAH HAMID
Anggota Komisi D
Fraksi PAN



ABDUL WAHID
Anggota Komisi D
Fraksi PPP



Hj. KARTINI
Anggota Komisi D
Fraksi Nuran Indonesia Bangkit



HARRY KURNIA PAKAMBANAN
Anggota Komisi D
Fraksi Partai Demokrat



STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD Kota Makassar

Kelompok
Jabatan Fungsional



Dr. Muhajir, S.KM, M.Kes
Kepala Bagian Urusan



Abdul Kadir, SE, MM
Kepala Bagian Keuangan



H. Dahyal, S.Sos
Kepala Bagian Hukum



Danief Katto, SE, MM
Kepala Bagian Pelaksanaan



Hj. Rafifah Luthfi, SE, MM
Kepala Bagian Persidangan

Sub Koordinator dan
Kelompok Jabatan
Fungsional



Mub. Nur Hafid, ST
Kepala Bidang Perencanaan, Kajian, dan Pengawasan



Mub. Nur Hafid, ST
Kepala Bidang Perencanaan, Kajian, dan Pengawasan



Mub. Nur Hafid, ST
Kepala Bidang Perencanaan, Kajian, dan Pengawasan

Sub Koordinator dan
Kelompok Jabatan
Fungsional

Sub Koordinator dan
Kelompok Jabatan
Fungsional



DIRGAHAYU
REPUBLIK INDONESIA

77
PULIH
LEBIH CEPAT
BANGKIT
LEBIH KUAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAKASSAR

KAREBA PARLEMEN TA'

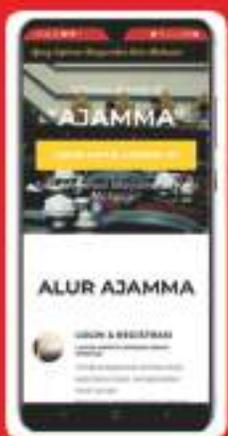
<https://dprd.makassar.go.id/>



Ajamma
DPRD Kota Makassar
AJang Aspirasi Masyarakat MAKassar



08114110309



Ajamma
DPRD Kota Makassar
AJang Aspirasi Masyarakat MAKassar

Ajamma adalah aplikasi mobile. sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan oleh masyarakat kepada pihak Anggota DPRD Kota Makassar.



DPRD KOTA MAKASSAR
@dprdkotamakassar



SEKRETARIAT DPRD MAKASSAR
setwan_dprd.mks



Ajamma Ki Disini
@humasdprdmakassar



DPRD MAKASSAR
humas dprd makassar

Website: <https://dprd.makassar.go.id/>

